



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP TAHUN 2019
BAGIAN ORGANISASI
DAN REFORMASI BIROKRASI

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menginformasikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2019 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2019.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun 2019. Dokumen ini juga memuat aspek akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang berisi target dan realisasi dalam membelanjakan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, 15 Maret 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LAKIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebanyak 18 (delapan belas) sasaran strategis yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 9 (sembilan) indikator dikategorikan sangat berhasil, 11 (sebelas) indikator dikategorikan berhasil. Meskipun demikian capaian untuk tahun berikutnya perlu perhatian untuk ditingkatkan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ihtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Matrik	ix
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
1. Kondisi Geografis	2
2. Demografis	4
3. Produk Domestik Regional Bruto	5
4. Pertumbuhan Ekonomi	6
C. Struktur Organisasi	8
D. Sumber Daya Aparatur	9
E. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Visi dan Misi	16
1. Visi	17
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran	17
B. Strategi dan Arah Kebijakan	19
C. Indikator Kinerja Utama	27
D. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Pengukuran Kinerja	31
B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama	32
C. Akuntabilitas Keuangan	109
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Rencana Perbaikan Kedepan	115

Lampiran

Daftar Lampiran

1. Pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.
2. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Padang Pariaman
3. Perjanjian Kinerja Padang Pariaman Tahun 2019
4. Matriks Pengukuran Kinerja Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 – 2019	4
Tabel 1.2	: Jumlah Pegawai Negeri sipil Berdasarkan data SIMPEG Tahun 2019	10
Tabel 2.1	: Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 – 2021	18
Tabel 2.2	: Hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 – 2021	20
Tabel 2.3	: Indikator Kinerja Utama	27
Tabel 2.4	: Perjanjian kinerja Tahun 2019 Kabupaten Padang Pariaman	29
Tabel 3.1	: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab	30
Tabel 3.2	: Pengukuran dengan Skala ordinal	32
Tabel 3.3	: Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019	33
Tabel 3.4	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019	35
Tabel 3.5	: Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah	37
Tabel 3.6	: Capaian kinerja misi 1	40
Tabel 3.7	: Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 1	40
Tabel 3.8	: Capaian Kinerja misi 2	41
Tabel 3.9	: Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 2	42
Tabel 3.10	: Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 3	46
Tabel 3.11	: Capaian kinerja misi 3	49
Tabel 3.12	: Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 4	50
Tabel 3.13	: Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat tahun 2019	51
Tabel 3.14	: Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 5	53
Tabel 3.15	: Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 6	55
Tabel 3.16	: Capaian Kinerja misi 4	63
Tabel 3.17	: Capaian indikator kinerja utama sasaran startegis 7	63
Tabel 3.18	: Data Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019	64
Tabel 3.19	: Nama Kelompok Sadar Wisata Berdasarkan Lokasi Wisata	67
Tabel 3.20	: Capaian indikator kinerja utama pada Sasaran strategis 8	69
Tabel 3.21	: Capaian indikator Kinerja sasaran strategis 9	70

Tabel 3.22	: Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 10	71
Tabel 3.23	: Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 11	72
Tabel 3.24	: Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 12	73
Tabel 3.25	: Capaian kinerja misi 5	77
Tabel 3.26	: Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 13	78
Tabel 3.27	: Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 14	83
Tabel 3.28	: Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 15	85
Tabel 3.29	: Capaian kinerja misi 6	91
Tabel 3.30	: Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 16	92
Tabel 3.31	: Skor hasil opini BPK	93
Tabel 3.32	: Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 16	95
Tabel 3.33	: Aspek Evaluasi SAKIP	96
Tabel 3.34	: Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 16	99
Tabel 3.35	: Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 17	100
Tabel 3.36	: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan OPD Tahun 2019	101
Tabel 3.37	: Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2018 – 2019	102
Tabel 3.38	: Nilai mutu pelayanan berdasarkan Permenpan RB	102
Tabel 3.39	: Capaian kinerja Misi 7	104
Tabel 3.40	: Anggaran Pendapatan dan belanja TA 2019	109
Tabel 3.41	: Target dan Realisasi pendapatan daerah tahun 2019	109
Tabel 3.42	: Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019	110
Tabel 3.43	: Target dan realisasi pendapatan Transfer TA 2019	110
Tabel 3.44	: Target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2019	111
Tabel 3.45	: Pencapaian Kinerja dan realisasi Anggaran Tahun 2019	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman	3
Gambar 1.2	: Jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin tahun 2019	4
Gambar 1.3	: Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku tahun 2015 – 2019	6
Gambar 1.4	: Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan tahun 2015 – 2019	6
Gambar 1.5	: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013-2018	8
Gambar 3.1	: Kegiatan Maghrib mengaji di salah satu kecamatan	41
Gambar 3.2	: Bupati Padang Pariaman mengunjungi kegiatan salah satu TPA-MDTA Kecamatan Patamuan	41
Gambar 3.3	: Pembangunan irigasi tersier	43
Gambar 3.4	: Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	43
Gambar 3.5	: Pembangunan Dam Parit	43
Gambar 3.6	: Penyerahan hand tractor oleh Bupati kepada kelompok tani	43
Gambar 3.7	: Brigade Tanam	43
Gambar 3.8	: Pemberantasan hama tupai bersama kelompok tani	44
Gambar 3.9	: Kegiatan Pelatihan Mesin Tempel	45
Gambar 3.10	: Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)	46
Gambar 3.11	: Pelayanan vaksinasi dan pengobatan ternak	46
Gambar 3.12	: Pengarahan Untuk Akreditasi Sekolah	55
Gambar 3.13	: Pemeriksaan Pasien TB	56
Gambar 3.14	: Penyuluhan Gernis Papa terhadap pasangan calon Pengantin oleh tenaga kesehatan	58
Gambar 3.15	: Petugas dan Laskar Nagari Peduli Pangan dan Gizi sedang melakukan pendampingan kepada masyarakat	59
Gambar 3.16	: Pemeriksaan kesehatan masyarakat pada kegiatan inovasi “ Jumpasepase”	60
Gambar 3.17	: Pelaksanaan JEVALA oleh tenaga kesehatan	60
Gambar 3.18	: Seorang Duta TB sedang melakukan kunjungan dan penyuluhan TB	60

Gambar 3.19	:	Pelaksanaan kegiatan “Cetap Mires” kepada ibu hamil beresiko	61
Gambar 3.20	:	Penerimaan cinder mata pada acara pameran pesona pariwisata di Yogyakarta	65
Gambar 3.21	:	Peta Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman	66
Gambar 3.22	:	Penampilan kesenian oleh salah satu sanggar di objek wisata Katapiang dan Tiram	66
Gambar 3.23	:	Sarana dan prasarana pariwisata Pantai Tiram	67
Gambar 3.24	:	Pelatihan pemandu wisata kepada Pokdarwis	68
Gambar 3.25	:	Kepala DPMPTP dalam Kegiatan Promosi Peluang Investasi Melalui Forum Investasi	74
Gambar 3.26	:	Kunjungan Tim LKPM Online ke Perusahaan-Perusahaan	75
Gambar 3.27	:	Kepala DPMPTP bersama Tim Palanta melayani langsung ke tempat pelaku usaha	76
Gambar 3.28	:	Penyerahan Bantuan Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	79
Gambar 3.29	:	Penyerahan Piagam Penghargaan kepada KPM PKH Graduasi Mandiri	79
Gambar 3.30	:	Penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam	80
Gambar 3.31	:	Penyaluran Bantuan LKKS	80
Gambar 3.32	:	Penyerahan Beras Sejahtera kepada Keluarga Miskin yang terdata dalam Basis Data Terpadu	81
Gambar 3.33	:	Pelaksanaan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan	81
Gambar 3.34	:	Kegiatan pelatihan Yang diadakan BLK	84
Gambar 3.35	:	Sosialisasi Penginputan data pada Simda Perencanaan	97
Gambar 3.36	:	Workshop Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019	100
Gambar 3.37	:	Suasana Pelayanan Masyarakat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil	103
Gambar 3.38	:	Suasana Pelayanan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan	103
Gambar 3.39	:	Pelayanan Masyarakat Yang Dilaksanakan di RSUD Padang Pariaman	103

Gambar 3.40	: Sosialisasi dan koordinasi tentang penanggulangan kebencanaan bersama camat dan wali nagari	107
-------------	---	-------	-----

DAFTAR MATRIK

Matrik 4.1	:	Masalah strateginya	dan	117
------------	---	------------------------	-----------	-----



PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 menjelaskan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) menyatakan penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah bentuk laporan yang dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten.

Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada para stakeholder maka penyusunan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman ini memiliki 2 (dua) dimensi fungsi, yaitu: 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja (dimensi eksternal) hal ini bermakna bahwa LAKIP merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada seluruh pihak eksternal (*stakeholder*) atas capaian kinerja selama periode tahun 2019. Esensi laporan capaian kinerja merujuk sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode pelaporan. 2) Aspek Manajemen Kinerja (dimensi internal) hal ini bermakna bahwa LAKIP Kabupaten Padang Pariaman merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

B. GAMBARAN UMUM

1. KONDISI GEOGRAFIS

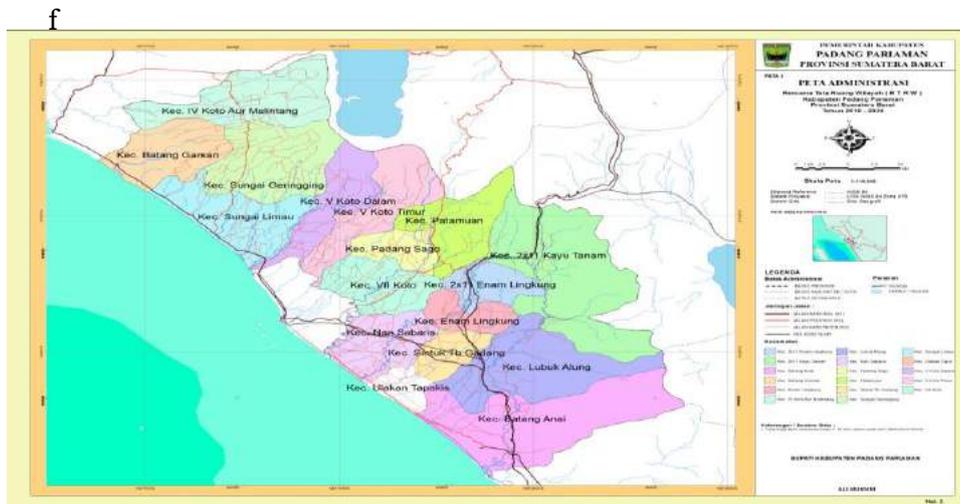
Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km² dengan panjang garis pantai 42,11 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°11'-0°49' Lintang Selatan dan 98°36' - 100°28' Bujur Timur.

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas wilayah administratif meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Agam
- Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Datar dan Kab. Solok
- Sebelah Selatan : Kota Padang
- Sebelah Barat : Kota Pariaman dan Samudera Indonesia

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dimana kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 Km², sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil, yakni 25,56 Km².

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman

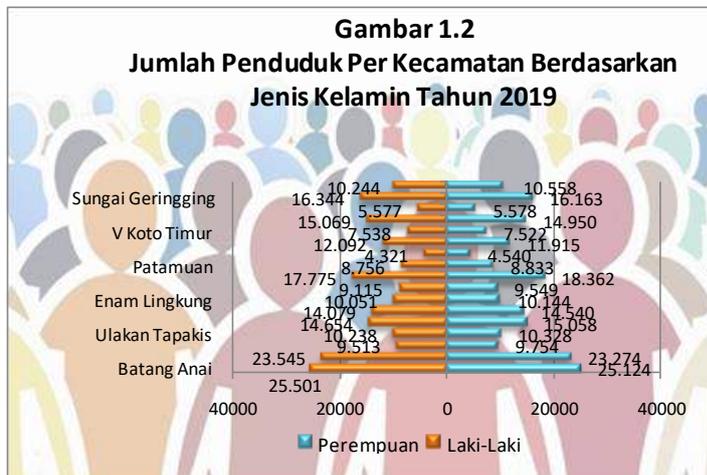


Pemerintahan terendah di Kabupaten Padang Pariaman disebut Nagari yang mana secara nasional disebut dengan Desa. Dimana secara keseluruhan terdiri dari 103 nagari. Nagari terbanyak berada di Kecamatan VII Koto yang mempunyai 12 (dua belas) nagari, sedangkan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Batang Gasan yang hanya mempunyai 3 (tiga) nagari.

Kabupaten Padang Pariaman termasuk beriklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut. Sesuai dengan data BPS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019, rata-rata curah hujan secara keseluruhan untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 adalah sebesar 392,6 milibar (mb), dengan rata-rata hari hujan sebanyak 18 hari per bulan. Temperatur rata-rata untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah 26,7 derajat celcius dengan kelembaban relatif 87 persen dan tekanan udara rata-rata 1010,2 milibar.

2. DEMOGRAFIS

Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 terdapat sebanyak 430.045 jiwa, yang terdiri dari 214.251 laki – laki dan 215.794 perempuan, sedangkan tahun sebelumnya tercatat sebanyak 427.919 jiwa (213.647 laki – laki dan 214.272



perempuan). Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 ini terhitung sebanyak 323,64 jiwa/KM². Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Batang Anai, yakni 50.625 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Padang Sago 8.861 jiwa. Data penduduk tersebut berdasarkan

kepada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester 1 Tahun 2019.

Jika dilihat perkembangan penduduk 5 tahun terakhir diketahui bahwa penduduk Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren peningkatan dari 403.530 tahun 2014 menjadi 430.045 pada tahun 2019. Untuk Laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2019

TAHUN	PENDUDUK			SEX RASIO	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km ²)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
2014	198.315	205.215	403.530	96,64	305
2015	199.808	206.268	406.076	96,87	306
2016	201.130	207.482	408.612	96,94	308
2017	202.400	208.603	411.003	97,00	309
2018	213.647	214.272	427.919	99,70	322
2019	214.251	215.794	430.045	99,28	323

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Semester 1 Tahun 2019

3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

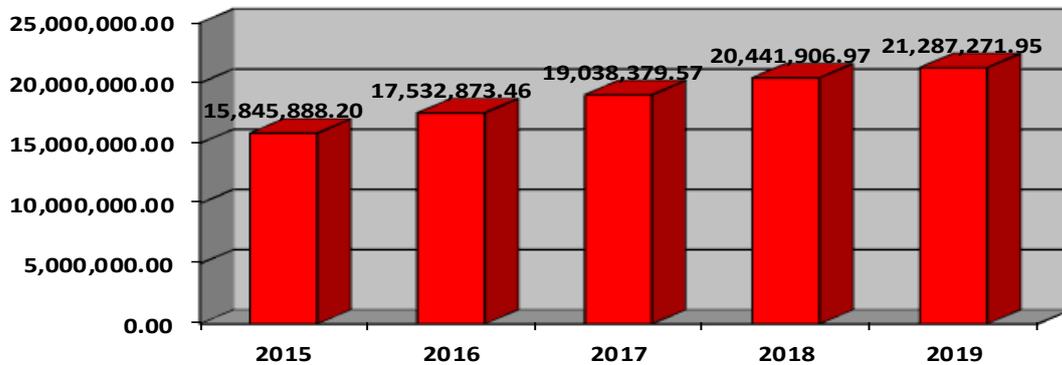
Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku maupun harga konstans setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk PDRB atas harga berlaku pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 845.364,98 juta rupiah dari Rp. 20.441.906,97 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi Rp. 21.287.271,95 juta rupiah pada tahun 2019. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini belum dapat mencerminkan perbaikan produktivitas ekonomi secara riil, karena kenaikan ini masih mengandung unsur inflasi. Data tersebut berdasarkan data statistik yang dituangkan pada dokumen Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2019.

Begitupun dengan PDRB atas harga konstans yang dapat menggambarkan produktivitas ekonomi secara riil juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 326.552,89 juta rupiah dari tahun 2018. Pada tahun 2018 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga konstans tersebut hanya Rp. 13.024.257,87 juta rupiah dan pada tahun 2019 menjadi 13.350.780,76 juta rupiah. Data tersebut juga berdasarkan dokumen Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2020.

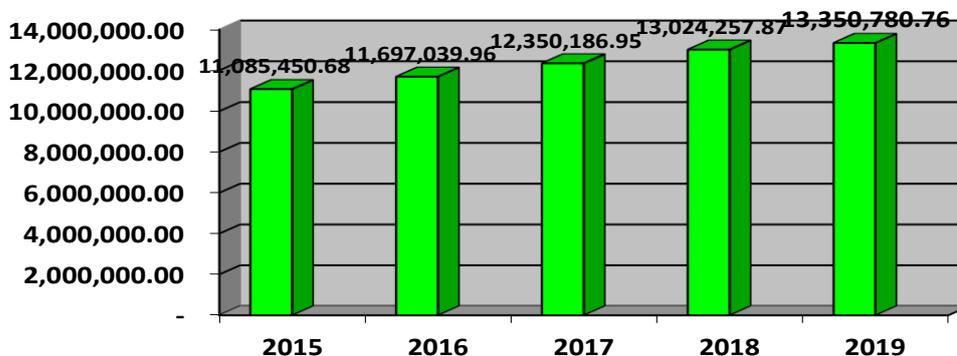
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan konstans ini dapat dilihat pada gambar 1.3 dan 1.4 berikut ini :

Gambar 1.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku
Tahun 2015-2019



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 1.4
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan
Tahun 2015-2019



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2020

4. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

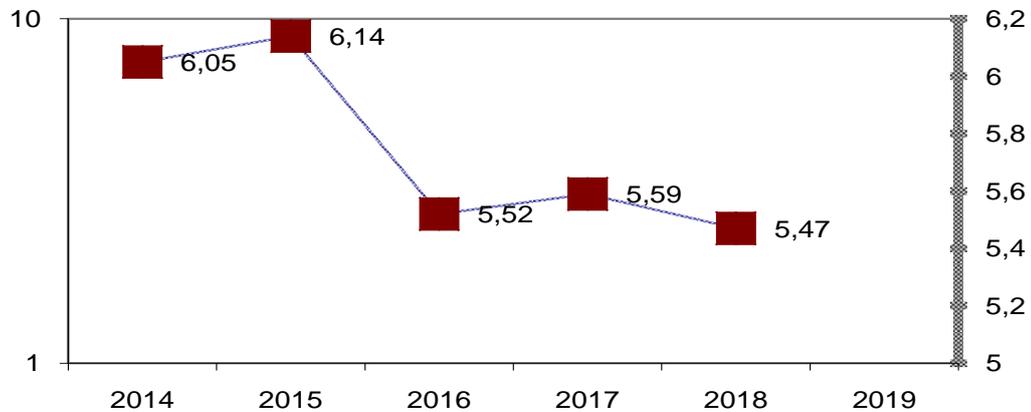
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman didukung berbagai sektor dimana sektor yang dominan adalah sektor Pertanian, sektor Angkutan dan

Komunikasi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai Rp.4.082.657.320,00 dan sektor transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 6.361.932.390,00 serta besarnya peranan lapangan usaha kedua lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Padang Pariaman yang mencapai lebih dari 19 persen selama lima tahun terakhir. Data tersebut berdasarkan data statistik yang dituangkan pada dokumen Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2020.

Peranan PDRB menurut lapangan usaha didominasi oleh kategori transportasi dan pergudangan sebesar 30,31 persen, kategori pertanian, perikanan dan kehutanan 19,18 persen, kategori industri Pengolahan 9,34 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,92 persen, Kontruksi 8,44 persen, dan Pertambangan dan Penggalian 6,32 persen. Besarnya kontribusi transportasi dan pergudangan ini disebabkan karena Padang Pariaman memiliki Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berlokasi di Kecamatan Batang Anai. Pelayanan penerbangan di BIM bukan hanya domestik tetapi juga internasional. Pengguna jasa bandara juga bukan hanya penduduk Sumatera Barat tetapi juga penduduk propinsi tetangga yang dekat dengan Sumatera Barat atau penduduk yang berkepentingan menggunakan jasa penerbangan BIM.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 naik menjadi 13,35 triliun rupiah dibandingkan tahun 2018 yaitu 13,02 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,51 persen, mengalami penurunan dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5,47 persen. Data tersebut berdasarkan dokumen Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2020.

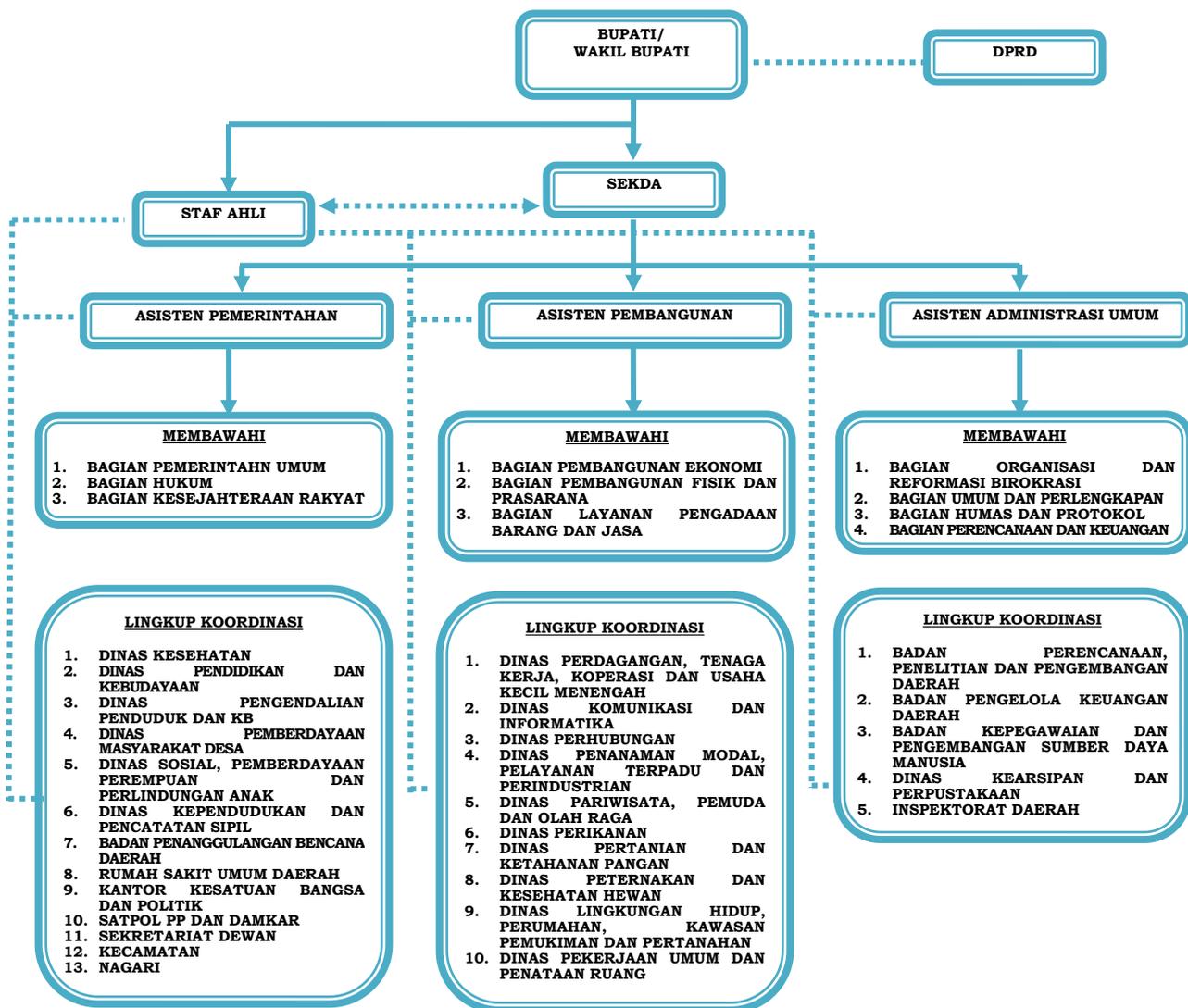
Gambar 1.5
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2014-2019



Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2020

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 3 Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah dipimpin Oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 10 Bagian, 18 Dinas Daerah, 3 Badan, 1 Kantor, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 BPBD serta 17 Kecamatan dan 103 Nagari.



Keterangan:

- > Garis Komando
- Garis Koordinasi
- ◀.....> Garis Koordinasi

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data SIMPEG Tahun

2019 sebanyak 6.377 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.791 orang (28,08 %) dan perempuan sebanyak 4.586 orang (71,91 %).

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
1.	SD/Sederajat	15	5	20
2.	SLTP/Sederajat	53	10	63
3.	SLTA/Sederajat	408	476	884
4.	Diploma I	31	158	189
5.	Diploma II	98	335	433
6.	Diploma III	92	699	791
7.	Strata I	930	2754	3.684
8.	Strata II	164	149	313
9.	Strata III	0	0	0
JUMLAH		1.791	4.586	6.377

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas diketahui bahwa PNS di Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Srata 1 dengan jumlah 3.684 orang (57,77 %), diikuti dengan ijazah SLTA sederajat 884 orang (13,86 %) dan Diploma 3 sebanyak 791 orang (12,40 %). Tingkat pendidikan PNS ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, kualitas PNS di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup baik dengan banyaknya PNS yang berpendidikan di atas SLTA sederajat mencapai 5.410 (84,83 %).

E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. ISU STRATEGIS

Dalam RPJMD periode 2016-2021 Kabupaten Padang Pariaman akan mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang *Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera* dengan mengidentifikasi isu-isu strategis. RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan akan dijabarkan pada perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dalam RKPD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan agama.
2. Upaya peningkatan peran lembaga sosial keagamaan.
3. Peran aktif lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah.
4. Peningkatan kerukunan dalam kelompok masyarakat dalam upaya menjaga dan mempertahankan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah.
6. Peningkatan produksi komoditi unggulan.
7. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian.
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi unggulan daerah.
10. Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing.
11. Peningkatan profesional dan kuantitas guru sebagai pendidik.
12. Peningkatan profesional pengelola & kualitas manajemen pendidikan.
13. Pembinaan dan pemasyarakat olahraga.
14. Meningkatnya prestasi olahraga.
15. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
16. Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan.
17. Permasalahan penanggulangan HIV/AIDS.
18. Mengembangkan destinasi wisata yang layak.
19. Meningkatkan kompetensi peran pelaku wisata.
20. Peningkatan pelaku ekonomi kreatif.
21. Pembangunan infrastruktur lebih memperhatikan fungsi lingkungan.
22. Pengembangan daerah baru yang strategis (tarok city).
23. Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah.
24. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.
25. Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi.
26. Peningkatan akses universal.
27. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
28. Mengembangkan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
29. Meningkatkan kualitas perencanaan ruang.
30. Pemberdayaan UKM, industri kecil menengah koperasi dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri.
31. Kemudahan berinvestasi.
32. Pengembangan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah.

33. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta optimalisasi perlindungan konsumen.
34. Mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan.
35. Mengembangkan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah.
36. Perlunya penguatan agribisnis dan agroindustri komoditi unggul.
37. Pemerataan ekonomi.
38. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.
39. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif.
40. Peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru.
41. Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarga sejahtera yang berwawasan kependudukan.
42. Peningkatan kesempatan berusaha.
43. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif.
44. Peningkatan jiwa kewirausahaan.
45. Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
46. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah.
47. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah.
48. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja instansi pemerintah.
49. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
50. Pengembangan e-gov dan implementasi smart city Kabupaten Padang Pariaman.
51. Pengelolaan abrasi pantai.
52. Kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan kebencanaan.
53. Pengembangan nagari tangguh bencana.
54. Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat.
55. Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana.

2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Pada bagian atau tahapan perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi

agenda utama rencana pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan pembangunan.

Permasalahan pokok pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada RKPD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya.
2. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
3. Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan sosial.
4. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas dan narkoba.
5. Daya saing produk pertanian relatif masih rendah.
6. Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian.
7. Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu.
8. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas.
9. Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan.
10. Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan.
11. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran.
12. Optimalisasi penerimaan daerah.
13. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Padang Pariaman.
14. Belum tuntasnya peningk. kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
15. Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan.
16. Ketimpangan distribusi guru di beberapa wilayah.
17. Permasalahan Penanggulangan HIV/AIDS.
18. Pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal.
19. Masih kurangnya sarana dan prasarana Rumah Sakit.
20. Tingginya status gizi buruk masyarakat dan prevalensi balita pendek belum dapat dikendalikan secara maksimal (Stunting).
21. Kualitas produk hasil olahan belum berdaya saing dan masih berorientasi lokal.
22. Masih melambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
23. Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan gambaran umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



**PERENCANAAN
KINERJA**



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Kabupaten Padang Pariaman dan diimplementasikan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Bupati Padang Pariaman dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama Kabupaten Padang Pariaman, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Padang Pariaman terutama dalam ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat dalam lingkup wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu RPJMD ini juga menjawab tiga pertanyaan dasar, yakni: (1) kemana Kabupaten Padang Pariaman akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

A. VISI DAN MISI

Dari berbagai macam isu strategis dalam membangun Kabupaten Padang Pariaman maka yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagaimana tertuang dalam “Visi dan Misi pembangunan” yaitu:

❖ **VISI**

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut:



“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”

Visi tersebut memiliki empat kata kunci yakni Menjadikan Kabupaten yang Baru, Masyarakat Religius, Mewujudkan Masyarakat Cerdas, dan Masyarakat yang Sejahtera, secara lebih terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. *Baru* yang dimaksud adalah suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman.
- b. *Religius* yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Cerdas* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.
- d. *Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

❖ **MISI**

Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera” ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- b. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
- d. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
- f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik.
- g. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang rama

❖ **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mencapai sesuatu yang dicita-citakan dalam masa akhir jabatan sesuai dengan Visi-Misi yang dicanangkan dan untuk mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan misi yang telah disusun maka perlu tujuan dari setiap misi dan diwujudkan dalam tolok ukur kinerja terukur yang tertuang dalam sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dapat digambarkan pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	Peningkatan Pengamalan Agama	Meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca al-quran
		Meningkatnya jumlah lembaga keagamaan yang aktif
Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor Primer dan Jasa	Meningkatkan perekonomian sektor primer dan jasa	Meningkatnya Kontribusi Sektor Primer Thdp PDRB
		Meningkatnya kesejahteraan petani
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan
		Meningkatnya mutu pendidikan
	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga daerah
		Meningkatnya akses kesehatan
Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata	Meningkatnya akses kesehatan masyarakat
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat
	Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya daya saing Wisata
		Meningkatnya kualitas destinasi Wisata
	Terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan
	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman
		Meningkatnya Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, dan transportasi	Meningkatnya Kualitas pengawasan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan tata ruang		
Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan, perindustrian dan transportasi terhadap PDRB		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kemudahan berinvestasi
		Meningkatnya jumlah investor
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Menurunnya tingkat pengangguran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan cakupan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
		Meningkatnya tingkat pendapatan
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif
		Mewujudkan ketahanan bencana
		Meningkatnya masyarakat tangguh bencana
		Meningkatnya sarana prasarana ramah bencana

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan dan arah kebijakan sangat erat kaitannya karena arah kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah disusun. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui Tujuh Misi maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Selanjutnya hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.2
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya			
1 Peningkatan Pengamalan agama	1.1 meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	1.1.1 Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidikan agama	1.1.1.1 Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Agama
	1.2 meningkatnya jumlah lembaga keagamaan yang aktif	1.2.1 Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan	1.2.1.1 Optimalisasi peran Lembaga Sosial Keagamaan
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor Primer dan Jasa			
Prioritas 2 : Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan			
1 Meningkatkan perekonomian sektor primer dan jasa	1.1 Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	1.1.1 Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah	1.1.1.1 Peningkatan pemakaian benih/bibit unggul bermutu
			1.1.1.2 Penataan jalur distribusi cadangan dan pasokan pangan
			1.1.1.3 Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan keragaman pangan
		1.1.2 Meningkatkan sarana dan Prasarana produksi pertanian	1.1.2.1 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana pertanian
			1.1.2.2 Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif/berbasis masyarakat
		1.1.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi unggulan daerah	1.1.3.1 Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah yang sesuai dengan standar jaminan mutu produk dan yang disertifikasikan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1.2.1 Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan	1.2.1.1 Peningkatan pemanfaatan inovasi tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan
			1.2.1.2 Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani dan nelayan
2	2.1 Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	2.1.1 Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor jasa	2.1.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor jasa
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik			
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia			
1	Terwujudnya Pemertaaan akses dan kualitas pendidikan	1.1 Meningkatnya akses pendidikan	1.1.1 Meningkatkan Daya dukung pemerataan, mutu pelayanan pendidikan
			1.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
			1.1.1.2 Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS
	1.2 Meningkatnya mutu pendidikan	1.2.1 Pengembangan kompetensi pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik	1.2.1.1 Meningkatkan Kualifikasi Akademik Pendidik dan tenaga kependidikan
		1.2.2 Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perpustakaan	1.2.2.1 Peningkatan Sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT
			1.2.2.2 Meningkatkan Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan
2	2.1. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga daerah	2.1.1 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2.1.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
		2.1.2 Peningkatan kompetisi olahraga	2.1.2.1 Peningkatan kualitas atlit, pelatih dan wasit
			2.1.2.2 Peningkatan apresiasi terhadap atlit dan pelatih yang berprestasi
			2.1.2.3 Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				2.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	2.1.3.1	Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga dan olah raga kemasyarakatan.
Prioritas 4 : Peningkatan Kesehatan Masyarakat							
2	Terwujudnya Pemertaaan akses dan kualitas kesehatan	3.1	Meningkatnya akses kesehatan	3.1.1	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	3.1.1.1	Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Terhadap Masyarakat
		3.2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	3.2.1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan	3.2.1.1	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
Misi 4 : Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.							
Prioritas 5 : Pengembangan Potensi Pariwisata Unggulan							
1	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata utama	1.1	Meningkatnya daya saing Wisata	1.1.1	Mengembangkan Destinasi Wisata	1.1.1.1	Peningkatan Sarana dan Prasana wisata
						1.1.1.2	Peningkatan Promosi Wisata
						1.1.1.3	Pelestarian Nilai Budaya Daerah
		1.2	Meningkatnya kualitas destinasi Wisata	1.2.1	meningkatkan kompetensi peran pelaku wisata	1.2.1.1	Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata
						1.2.1.2	Meningkatan SDM pelaku wisata
						1.2.1.3	Penyediaan sarana dan prasarana pelaku wisata
				1.2.2	Peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1.2.1.4	Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif
Prioritas 6 : Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berbasis Tata Ruang							
2	Menyediakan infrastruktur daerah yang berkualitas	2.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	2.1.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	2.1.1.1	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2.1.1.2 Rehabilitasi jalan dan jembatan
		2.1.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi	2.1.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan dan pengembangan sistem transportasi
	2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	2.2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	2.2.1.1 meningkatnya pembangunan jaringan irigasi
			2.2.1.2 Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
	2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	2.3.1 Peningkatan akses Universal	2.3.1.1 Pengelolaan Layanan Air Bersih
			2.3.1.2 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
			2.3.1.3 Pengelolaan Sanitasi yang layak
3	Terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	3.1 Meningkatnya Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	3.1.1 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	3.2 Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan LH		
4	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman dan berkelanjutan	4.1 Meningkatnya pemanfaatan kawasan startegis sesuai dengan perencanaan tata ruang	4.1.2 Mengembangkan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis
		4.1.1 Menigkatkan kualitas perencanaan ruang	4.1.1.1 Penguatan kelembagaan Pengendalian pemanfaatan ruang
	4.2 Meningkatkan Pengendalian pemanfaatan tata ruang		4.1.1.2 Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang.
Prioritas 7 : Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah			

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, dan transportasi	5.1 Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, industri dan transportasi terhadap PDRB	5.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta optimalisasi perlindungan konsumen	5.1.1.1 Pengembangan sarana dan prasarana pasar dan peningkatan pasar tertib ukur
			5.1.2 Mengembangkan Industri pengolahan berbasis komoditi unggulan	5.1.2.1 Pengembangan sentra industri komoditi dan produk unggulan daerah
6	Meningkatnya jumlah investasi	5.2 Meningkatkan kemudahan berinvestasi	5.2.1 Mengembangkan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah	5.2.1.1 Menciptakan iklim investasi yang kondusif
			5.3 Meningkatkan jumlah investor	5.2.1.2 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.				
Prioritas 8 : Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran				
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin	1.1.1 Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar	1.1.1.1 Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Infrastruktur dan pelayanan dasar
			1.1.2 penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif	1.1.2.1 Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		1.2 Menurunnya tingkat pengangguran	1.1.3 Peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru	1.1.3.1 Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan produktivitasnya
				1.1.3.2 Peningkatan produktivitas tenaga kerja
		1.3 Menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan cakupan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.1.4 Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarga sejahtera yang berwawasan kependudukan	1.1.4.1 Meningkatkan Kesertaan KB
				1.1.5.1 Mewujudkan Grand Design Kependudukan berbasis pembangunan daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				1.1.6.1 Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap program KKBPK
				1.1.7.1 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
		1.4 Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Peningkatan kesempatan berusaha	1.1.8.1 Berkembangnya Usaha Mikro dan Koperasi
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik				
Prioritas 9 : Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah				
1	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	1.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.	1.1.1 Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah	1.1.1.1 Peningkatan pengelolaan dan pelaporan Keuangan Daerah berbasis aktual
			1.1.2 Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah	1.1.1.2 Peningkatan Kinerja Sistim Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, aspiratif, dan partisipatif	1.2.1 Peningkatan kualitas pelayanan public	1.2.1.1 Peningkatan penerapan standar pelayanan minimal
				1.2.1.2 Penerapan Standar pelayanan minimal, Standar operasional prosedur pada lingkup pemerintah daerah
				1.2.1.3 Meningkatnya Penggunaan Sistim Informasi Daerah

Misi 7 : Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Prioritas 10 : Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

1	Mewujudkan	1.1 meningkatnya masyarakat	1.1.1 Nagari Tangguh bencana	1.1.1.1 Penyediaan informasi kebencanaan
---	------------	-----------------------------	------------------------------	--

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	ketahanan bencana	yang tangguh bencana		
				1.1.1.2 Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana
				1.1.1.3 Peningkatan posko penanggulangan bencana
				1.1.1.4 Penguatan regulasi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana
2		2.1 meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah bencana	2.1.1 Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat	2.1.1.1 Penyiapan sarana dan prasarana siaga tanggap darurat
			2.1.2 Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana	2.1.2.1 Rehab dan Rekon kawasan bencana

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Peningkatan Pengamalan agama	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran
2	Meningkatkan perekonomian sektor primer dan jasa	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian
		Meningkatkann Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani
3	Terwujudnya Pemertaan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah
		Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B
4	Terwujudnya Pemertaan akses dan kualitas kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup
5	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata utama	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata
6	Menyediakan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak
7	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh
8	Meningkatnya jumlah investasi	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor
9	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan
10		Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita
11	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
			Nilai LPPD

10	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD
11	Mewujudkan ketahanan bencana	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana

D. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016-2021 telah direvisi dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 , selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun Anggaran 2018 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 , dan kemudian disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai oleh Bupati. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi target kinerja yang harus diwujudkan oleh Bupati dan pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap Pemerintahan Daerah. Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Kabupaten Padang Pariaman**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	80%
2	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. 2.588.467,93
3	Meningkatkan Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	97,20
4	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,62 tahun
5	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	46%
6	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,98 tahun
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	70.000 orang
8	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	64%
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	50,6
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80%
11	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh	8
12	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor	65
13	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	8,26%
14	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	7,68
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	53,516 Juta Rp
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	BB
		Nilai LPPD	3.3
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	78.61
18	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	2 nagari



**AKUNTABILITAS
KINERJA**



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A kuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2019, akuntabilitas kinerja Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan informasi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian 18 (delapan belas) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah digunakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.



Adapun 18 (delapan belas) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama serta penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	Disdikbud, Setda (Kesra), Kecamatan
2	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Meningkatkann Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Distan KP, Disnak Keswan dan Dinas Perikanan
4	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Disdikbud
5	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	Disdikbud
6	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan, RSUD
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	Disparpora

8	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	Dinas PUPR
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	Dinas PUPR
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	Dinas PUPR, Dinas LHPKPP
11	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh	Dinas PUPR, Bapelitbangda
12	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor	DPMPTP
13	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	Dinas Sosial P3A, DPMD, Dinkes, Disdagnakerkop UKM, Dinkes
14	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	Disdagnakerkop UKM, DPMPTP, DPMD
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	Disdagnakerkop UKM, DPKD, Distan KP, Disnak Keswan
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	BPKD, Seluruh Perangkat Daerah, Inspektorat
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Setda, Inspektorat, Bapelitbangda, Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai LPPD	Setda, Seluruh Perangkat Daerah
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	Semua OPD
18	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	BPBD, Satpol PP Damkar

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *out put* dan *out come* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut

dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.2. Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
x > 100	Sangat Berhasil
75 < x < 100	Berhasil
55 < x < 75	Cukup Berhasil
x < 55	Kurang Berhasil

B. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang

ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 yang terdiri dari 18 (delapan belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah							
Tujuan : Peningkatan Pengamalan Agama							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	%	80%	84,65%	105,81	Sangat Berhasil
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa							
Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Sektor Primer dan Jasa							
1	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp	Rp.2.588.467,93	Rp.4.082.657,32	157,72	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	Nilai	97,20	95,99	98,76	Berhasil
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas Dan Terampil Melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dan Kualitas Tenaga Pendidik							
Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan							
1.	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,62 tahun	13,62 tahun	100	Berhasil
2.	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	%	46%	87,42%	190,04	Sangat Berhasil
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan							
3.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,98 tahun	68,58 tahun	98	Berhasil
Misi 4 : Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan							
Tujuan 1 : Terwujudnya Padang Pariaman Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama							
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	Orang	70.000 orang	396.790 orang	566,84	Sangat Berhasil
Tujuan 2 : Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas							
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	%	64%	63,68%	99,50	Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	Rasio	50,6	55,26	109,21	Sangat Berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	%	80%	64%	80	Berhasil
Tujuan 3 : Terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan							
5.	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Kawasan	8	7	87,50	Berhasil
Tujuan 4 : Meningkatkan Jumlah Investasi							
6.	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah Investor	Investor	65 investor	84 investor	129,23	Sangat Berhasil
Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan							
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin							
1.	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka kemiskinan	%	8,26%	7,10%	114,04	Sangat Berhasil
2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Angka Pengangguran Terbuka	%	7,68%	5,97%	122,26	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	Juta Rp	53,516 Juta Rp	51,218 Juta Rp	95,71	Berhasil
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik							
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel							
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WDP	75	Berhasil
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	BB	B	80	Berhasil
		Nilai LPPD	Nilai	3.3	2,99	91	Berhasil
Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas							
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima, Aspiratif Dan Partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	Indeks	78.61	79,66	101,34	Sangat Berhasil
Misi 7 : Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Kesiapan Sarana Dan Prasarana Yang Ramah Bencana							
Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Bencana							
1.	Meningkatnya Masyarakat Tangguh Bencana	Nagari Tangguh Bencana	Nagari	2 nagari	2 nagari	100	Berhasil

Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah								
Tujuan : Peningkatan Pengamalan Agama								
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	%	70%	80%	84,65%	105,81	Sangat Berhasil
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa								
Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Sektor Primer dan Jasa								
1	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp	Rp.3.812.952,59	Rp.2.588.467,93	Rp.4.082.657,32	157,72	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	Nilai	95,31	97,20	95,99	98,76	Berhasil
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas Dan Terampil Melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dan Kualitas Tenaga Pendidik								
Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan								
1.	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,57 tahun	13,62 tahun	13,62 tahun	100	Berhasil
2.	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	%	80,34 %	46%	87,42%	190,04	Sangat Berhasil
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan								
3.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,23 tahun	69,98 tahun	68,58 tahun	98	Berhasil
Misi 4 : Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan								
Tujuan 1 : Terwujudnya Padang Pariaman Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama								
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	183.600 orang	70.000 orang	396.790 orang	566,84	Sangat Berhasil
Tujuan 2 : Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas								
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	%	62,28%	64%	63,68%	99,50	Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	Rasio	47,12	50,6	55,26	109,21	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	%	62,67 %	80%	64%	80	Berhasil

Tujuan 3 : Terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan

5.	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Kawasan	7	8	7	87,50	Berhasil
----	---	---	---------	---	---	---	-------	----------

Tujuan 4 : Meningkatnya Jumlah Investasi

6.	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah Investor	Investor	69 investor	65 investor	84 investor	129,23	Sangat Berhasil
----	------------------------------	-----------------	----------	-------------	-------------	-------------	--------	-----------------

Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

1.	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka kemiskinan	%	8,04%	8,26%	7,10%	114,04	Sangat Berhasil
2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Angka Pengangguran Terbuka	%	6,90%	7,68%	5,97%	122,26	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	Juta Rp	46,73 Juta Rp	53,516 Juta Rp	51,218 Juta Rp	95,71	Berhasil

Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel

1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WDP	75	Berhasil
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	B	BB	B	80	Berhasil
		Nilai LPPD	Nilai	3,12	3.3	2,99	91	Berhasil

Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima, Aspiratif Dan Partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	Indeks	76,20	78.61	79,66	101,34	Sangat Berhasil
----	--	---	--------	-------	-------	-------	--------	-----------------

Misi 7 : Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Kesiapan Sarana Dan Prasarana Yang Ramah Bencana

Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Bencana

1.	Meningkatnya Masyarakat Tangguh Bencana	Nagari Tangguh Bencana	Nagari	2 nagari	2 nagari	2 nagari	100	Berhasil
----	---	------------------------	--------	----------	----------	----------	-----	----------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sedangkan capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah														
Tujuan : Peningkatan Pengamalan Agama														
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah				%	Kategori
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019		
1	Meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	%	-	-	70	80	90	-	-	70	84,65	94,05	Berhasil
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa														
Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Sektor Primer dan Jasa														
1	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp	2.309.789,45	2.399.178,30	2.492.026,50	2.588.467,93	2.688.641,64	3.488.872,07	3.680.814,68	3.812.952,59	4.082.657,32	151,84	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	Nilai	96,30	96,60	96,90	97,20	97,50	97,67	96,97	95,31	95,99	98,45	Berhasil
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas Dan Terampil Melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dan Kualitas Tenaga Pendidik														
Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan														
1	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,56	13,58	13,60	13,62	13,64	13,55	13,56	13,57	13,62	99,85	Berhasil
2	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	%	38	40	43	46	50	42	45	80,34	87,42	174,84	Sangat Berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan

3	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,55	69,66	69,87	69,98	70	67,80	67,96	68,23	68,58	97,97	Berhasil
---	--	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	----	-------	-------	-------	-------	-------	----------

Misi 4 : Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan

Tujuan 1 : Terwujudnya Padang Pariaman Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama

1	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	Orang	40.000	55.000	60.000	70.000	80.000	48.000	156.445	183.600	396.790	495,98	Sangat Berhasil
---	--	-------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	-----------------

Tujuan 2 : Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas

2	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	%	55	58	61	64	67	57,75	59,47	62,28	63,68	95,04	Berhasil
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	Rasio	39,4	42,6	46,3	50,6	54,4	40,13	43,00	47,12	55,26	101,58	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	%	59	67	78	80	90	69	67	62,67	64	71,11	Cukup Berhasil

Tujuan 3 : Terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan

5	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Kawasan	5	7	8	8	8	3	4	7	7	87,50	Berhasil
---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	----------

Tujuan 4 : Meningkatkan Jumlah Investasi

6	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah Investor	Investor	55	45	55	65	75	45	45	69	84	112	Sangat Berhasil
---	------------------------------	-----------------	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----------------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

1	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka kemiskinan	%	8,91	8,65	8,53	8,26	7,54	8,91	8,46	8,04	7,10	105,83	Sangat Berhasil
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	%	7,80	7,76	7,72	7,68	7,65	-	6,65	6,90	5,97	121,96	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	Juta Rp	38,9975	42,8798	45,8813	53,516	57,7973	42,908	46,321	49,463	51,218	88,61	Berhasil

Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel

1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	75	Berhasil
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	CC	B	B	BB	BB	B	B	B	B	B	80	Berhasil
		Nilai LPPD	Nilai	3,18	3,2	3,25	3,3	3,25	3,068	3,02	3,12	2,99	92	Berhasil	

Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

2	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima, Aspiratif Dan Partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	Indeks	72.68	74.32	76.61	78.61	81,00	70,15	73,82	76.20	79.66	98,34	Berhasil
---	--	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

Misi 7 : Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Kesiapan Sarana Dan Prasarana Yang Ramah Bencana

Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Bencana

1	Meningkatnya Masyarakat Tangguh Bencana	Nagari Tangguh Bencana	Nagari	2	2	2	2	6	0	0	2	2	66,66	Cukup Berhasil
---	---	------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	----------------

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Misi 1

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah							
Tujuan : Peningkatan Pengamalan Agama							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	70%	80 %	84,65 %	105,81 %	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	%	70%	80%	84,65 %	105,81	Sangat Berhasil

Pada tabel 3.7 di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja utama “persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran” adalah 84,65 persen dan mampu melebihi target yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja sebesar 80 persen. Realisasi pada tahun 2019 ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 70 persen. Capaian kinerja indikator ini juga dikategorikan sangat berhasil dengan capaian kinerja sebesar 106,25 persen.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran :
$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Usia 13 s.d 15 tahun yang baca Al - Qur'an}}{\text{Jumlah masyarakat usia 13 s/d 15 tahun seluruhnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat usia 13 s/d 15 tahun seluruhnya di tahun 2019 berjumlah 27.828 orang sedangkan jumlah masyarakat usia 13 s/d 15 tahun yang bisa baca Alqur'an sebanyak 23.143 orang.

Keberhasilan capaian kinerja ini terwujud berkat upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kecamatan seperti gencarnya sosialisasi kegiatan magrib mengaji dan Didikan Shubuh serta kegiatan pembinaan Ikatan Guru Mengaji (IGM) yang ada di setiap kecamatan. Selain itu, juga diwujudkan oleh Pemerintahan nagari yang melakukan program pembinaan terhadap TPA/TPSA yang ada di wilayahnya melalui bantuan sarana dan prasarana serta pemberian insentif/ honor bagi guru TPA dan TPSA. Keberhasilan capaian ini juga berkat dukungan dan kepedulian yang tinggi masyarakat Padang Pariaman yang dikenal religius dengan filsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sehingga misi satu pada sasaran meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran dapat dianggap tercapai dengan gemilang.



Gambar 3.1
Kegiatan Maghrib mengaji di salah satu kecamatan



Gambar 3.2
Bupati Padang Pariaman mengunjungi kegiatan salah satu TPA-MDTA Kecamatan Patamuan

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Misi 2

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa							
Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Sektor Primer dan Jasa							
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018 (jutaan)	Tahun 2019			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp.3.812.952,59	Rp.2.558.467,93	Rp.4.082.657,32	157,72%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kesejahteraan petani	Nilai tukar Petani	95,31	97,20	95,99	98,76	Berhasil

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2.	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp	Rp.3.812.952,59	Rp.2.588.467,93	Rp.4.082.657,32	157,72%	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : $\frac{PDRB \text{ Sektor Pertanian Tahun sekarang} - PDRB \text{ Sektor Pertanian Tahun lalu}}{PDRB \text{ Sektor Pertanian Tahun lalu}} \times 100\%$

Berdasarkan tabel 3.9 diketahui bahwa realisasi nilai PDRB sektor pertanian berdasarkan harga berlaku tahun 2019 sebesar Rp. 4.082.657,32. Nilai ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.558.467,93 dengan capaian sebesar 157,72 persen. Realisasi Nilai nilai PDRB sektor pertanian tahun 2019 juga meningkat sebesar Rp.269.704,53,- (5,07 %) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Untuk meningkatkan Nilai PDRB sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan yang diwujudkan dalam berbagai program pada dinas terkait antara lain :

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui upaya :
 - Pengembangan perbenihan tanaman pangan, dengan mengeluarkan sertifikat varietas unggul padi “Putiah Papanai” yang mempunyai produksinya tinggi, dan ketahanan terhadap serangan hama penyakit wereng coklat.
 - Pengembangan infrastruktur pertanian dengan membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana pertanian, salah satunya sarana irigasi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi ketiap areal/lahan kelompok tani. Adapun kegiatan yang mendukung pembangunan sarana irigasi yaitu Kegiatan Peningkatan Produktivitas Produksi Pertanian (DAK Bidang Pertanian) dan Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian melalui Peningkatan Produktivitas Lahan dan Air (HIBAH WISMP). Output dari kegiatan ini berupa tersedianya jaringan irigasi tersier, dam parit, pompanisasi/pipanisasi dan jalan usaha tani.



Gambar 3.3
Pembangunan irigasi tersier



Gambar 3.4
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)



Gambar 3.5
Pembangunan Dam Parit

- Penerapan teknologi baik dalam budi daya maupun pasca panen melalui pemberian bantuan dan pinjaman alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada petani berupa pompa air, alat pengolahan tanah (*handtraktor*) dan sebagainya. Khusus untuk *handtraktor* melalui Kegiatan Operasional Brigade Tanam petani boleh meminjam pakai *handtraktor* yang ada pada DistanKP. Masyarakat tani melalui kelompok tani dapat memanfaatkan alsintan ini dengan mengajukan surat permohonan peminjaman.



Gambar 3.6
Penyerahan hand tractor oleh Bupati kepada kelompok tani



Gambar 3.7 Brigade Tanam

- Pada teknis budidaya terus berupaya mentransfer teknologi-teknologi baru kepada petani seperti teknologi tanam jajar legowo. Adapun manfaat penerapan pola tanam jajar legowo ini yakni: 1). Jumlah anakan tanaman padi semakin banyak, 2). Produktivitas padi akan meningkat, 3). Kualitas gabah akan semakin bagus, 4). Mengurangi tingkat serangan hama dan penyakit, 4). Mempermudah perawatan dan pemupukan, dan 6). Dapat menghemat penggunaan pupuk
- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh atau petugas lapangan serta peningkatan SDM dari petani itu sendiri melalui sekolah lapangan, mengutus petugas untuk mengikuti pelatihan atau diklat-diklat kompetensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, provinsi ataupun oleh Kementan RI.

- Pemberian bantuan alat pasca panen berupa Thresher untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat panen. Pada tahun 2017 telah disalurkan sebanyak 10 unit kepada 10 kelompok tani, 12 unit pada tahun 2018 dan 8 unit pada tahun 2019. Selain bantuan Thresher, untuk mengurangi kehilangan hasil pasca panen pada tanaman jagung telah diberikan bantuan alat pasca panen berupa 2 unit corn seller (pemipil jagung) pada tahun 2018.
- Penerapan teknologi alsintan untuk menanam padi dan jagung. Alat dan mesin yang digunakan untuk menanam padi yakni *Rice transplanter*, sedangkan untuk jagung menggunakan *Corn transplanter*.
- Pengendalian hama dengan melibatkan stakeholders yang terkait seperti Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Nagari serta kelompok tani. Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan dan pengendalian secara mekanis di lapangan, memberikan obat-obatan pemberantasan hama tikus kepada kelompok tani serta memfasilitasi sarana pemberantasan hama tikus kepada masyarakat tani melalui kelompok tani, salah satunya alat Solder Bakar (*Flame Blower*). Selain itu juga pemberantasan hama tupai untuk tanaman perkebunan.



Gambar 3.8

Pemberantasan hama tupai bersama kelompok tani

- Pengadaan bibit tanaman kelapa yang bermutu tinggi yang didistribusikan kepada masyarakat tani melalui kelompok-kelompok tani yang berada di daerah atau kawasan yang berpotensi untuk pengembangan tanaman kelapa. Pada tahun 2017 telah tersalurkan 18.300 batang bibit kelapa kepada 29 kelompok tani, tahun 2018 sebanyak 69.300 batang kepada 66 kelompok tani. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 10.250 Batang. Kegiatan ini tertuang pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Selain komoditi kelapa juga telah dikembangkan jenis tanaman perkebunan baru yakni tanaman Pinang Wangi yang mempunyai nilai jual ekspor ke negara lain.

b. Meningkatkan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya melalui upaya :

- Pelatihan terhadap para nelayan tentang cara merawat dan memperbaiki mesin kapal sehingga mampu memperbaiki mesin kapal sendiri. Pelatihan teknologi mesin kapal penangkapan ikan yang diikuti oleh 20 kelompok.



Gambar 3.9

Kegiatan Pelatihan Mesin Tempel

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya) berupa pengadaan kapal kapasitas 3GT untuk nelayan beserta peralatan tangkapnya. Pengadaan kapal 3GT berjumlah 8 unit yang disertai dengan mesin dan peralatan penangkapan ikan diberikan kepada 8 kelompok nelayan yang tersebar di wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu juga pemberian bantuan kolam terpal kepada masyarakat beserta bibit udang ataupun bibit ikan dan juga dilengkapi dengan pakan ikan. Pada tahun 2019, kegiatan ini meliputi demplot atau paket percontohan yang diberikan kepada kelompok pembudidaya udang, lele dan nila (minapadi) yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.
 - Pengendalian Hama dan Penyakit yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pembudidaya ikan dalam pengendalian penyakit ikan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya.
- C. Peningkatan hasil produksi peternakan

Kabupaten Padang Pariaman melalui telah melakukan kegiatan diantaranya, percepatan produksi ternak melalui kawin buatan (IB) dalam rangka peningkatan kelahiran ternak/pedet, serta pemeriksaan kebuntingan (Pkb), pemeriksaan reproduksi serta pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak melalui vaksinasi ternak.



Gambar 3.10
Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)



Gambar 3.11
Pelayanan vaksinasi dan pengobatan ternak

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
3.	Nilai Tukar Petani	nilai	95,31	97,20	95,99	98,76	Berhasil

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Indek yang diterima petani (It)}}{\text{Indek yang dibayar petani (Ib)}} \times 100\%$$

Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, yang mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budi daya). Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan

perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang dan jasa non makanan.

Secara umum NTP menghasilkan 3 pengertian:

- $NTP > 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.
- $NTP = 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dijelaskan bahwa realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 95,99 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 97,20 dengan persentase capaian kinerja 98,76 persen. Meskipun demikian, realisasi NTP tahun 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan 2018 yaitu 95,31. Peningkatan NTP menunjukkan adanya peningkatan daya beli petani pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Untuk mewujudkan capaian indikator sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Perikanan di tahun 2019 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui program:
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan:

- Peningkatan kemampuan lembaga petani
- Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani
- Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao
- Pengembangan Nagari Model Kelapa
- Pengembangan Produk Olahan Kelapa
- Pelatihan petani dan Pelaku agribisnis tanaman pangan hortikultura
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), melalui kegiatan:
 - Penanganan daerah rawan pangan
 - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
 - Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
 - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 - Pengembangan lumbung pangan desa
 - Pengembangan perbenihan/pembibitan
 - Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 - Penyuluhan sumber pangan alternatif
 - Pemanfaatan Lahan Terlantar melalui Optimalisasi Lahan (OPL)
 - Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - Pengembangan usaha pertanian melalui peningkatan produktifitas lahan dan air (Pendamping Paralel WISMP2)
 - Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air
 - Pengadaan Alsintan
 - Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Nagari Mandiri Pangan
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
 - Penunjang Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
 - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - Pengembangan Usaha Pertanian Organik
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
 - Pengembangan Rehabilitasi Kelapa
 - Perlindungan dan Pengendalian HPT Tanaman Pangan
 - Pengendalian Hama dan PenyakitTanaman Perkebunan (buru tupai)
 - Pengembangan Tanaman Hortikultura
 - Pengembangan tanaman perkebunan
 - Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (DAK 2019)
 - Peningkatan produktivitas produksi pertanian (Pendamping DAK 2019)

- Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah
 - Peningkatan Produksi Kakao Melalui Intensifikasi
 - Rehabilitasi tanaman kakao
 - Pembangunan/Rhabilitasi Insfrastruktur Pertanian
 - Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, melalui kegiatan:
 - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
 - Peningkatan Kapasitas Petani
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui program:
- Program peningkatan hasil produksi peternakan, melalui kegiatan:
 - Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
 - Pelayanan Inseminasi Buatan
 - Penyuluhan dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terhadap perkembangan ternak masyarakat
 - Program pemasaran produksi peternakan, melalui kegiatan:
 - Promosi hasil produk peternakan
 - Pembinaan Pengolahan Hasil Peternakan
 - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, melalui kegiatan:
 - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
 - Pelayanan Kesehatan hewan
 - Pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung
 - Pengawasan Kesmavet
3. Dinas Perikanan melalui program:
- Program pengembangan budidaya perikanan, melalui kegiatan:
 - Pengembangan Wirausaha Perikanan
 - Optimalisasi pemanfaatan kolam terlantar

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Misi 3

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas Dan Terampil Melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dan Kualitas Tenaga Pendidik							
Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,57	13,62	13,62	100 %	Berhasil
2.	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	80,34 %	46 %	87,42 %	190,04 %	Sangat Berhasil

Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan

3.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,23	69,98	68,58	98%	Berhasil
----	--	---------------------	-------	-------	-------	-----	----------



Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
4.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,57	13,62	13,62	100 %	Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman, 2019

Berdasarkan tabel 3.12 di atas diketahui bahwa realisasi indikator Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2019 mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 13,62 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, capaian Angka Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan sebesar 0,05 % pada tahun 2019.

Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan formula :

Formulasi Pengukuran : Jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan/tingkat tertinggi yang pernah diduduki.

Berdasarkan data BPS tahun 2019, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi 9 dari 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Kota Padang merupakan daerah dengan Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi di Sumatera Barat dengan capaian 16,51 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman ini masih dibawah capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yaitu 14,01 tahun.

Tabel 3.13
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten / Kota
di Sumatera Barat tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	2019
1	Kep. Mentawai	12,76
2	Pesisir Selatan	13,31
3	Solok	13,03
4	Sijunjung	12,36
5	Tanah Datar	14,32
6	Padang Pariaman	13,62
7	Agam	13,86
8	Lima Puluh Kota	13,28
9	Pasaman	12,79
10	Solok Selatan	12,70
11	Dharmasraya	12,42
12	Pasaman Barat	13,40
13	Padang	16,51
14	Solok	14,31
15	Sawah Lunto	13,16
16	Padang Panjang	15,05
17	Bukittinggi	14,96
18	Payakumbuh	14,25
19	Pariaman	14,55
	Sumatera Barat	14,01

Sumber : BPS Padang Pariaman, 2020

Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Non Formal

4. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- ❖ Hambatan dan Masalah
1. Adanya kecenderungan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya keluar Kabupaten Padang Pariaman terkait mutu sekolah.
 2. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan, berhubung masih kurang SDM dan Anggaran yang tersedia.
 3. Pendidikan non formal masih belum tersentuh secara luas di masyarakat.
 4. Faktor Kemiskinan yang mempengaruhi angka putus sekolah.
 5. Topografi, Padang Pariaman terdiri sebagian berbukit dan terjal sehingga rawan untuk dilewati dan kawasan permukiman yang berjauhan dari sarana pendidikan.
- ❖ Strategi pemecahan masalah:
1. Memberikan reward atau perhatian khusus dari pemerintah Daerah kepada siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di dalam Kabupaten Padang Pariaman
 2. Sekolah merdeka tetap merujuk ke aturan/ kurikulum yang berlaku
 3. Peningkatan mutu pendidikan melalui melalui peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidik, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
 4. Peningkatan pengalokasian anggaran pendidikan dengan memenuhi ketentuan peraturan sebesar 20 persen.
 5. Penempatan kepala satuan pendidikan yang mempunyai SDM dan skil yang relevan dan punya kemauan yang keras dan disiplin.
 6. Melakukan redistribusi tenaga pendidik untuk meningkatkan ratio guru dengan murid sesuai dengan ketentuan.
 7. Perbaiki infrastruktur untuk peningkatan akses ke sekolah
 8. Mendistribusikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan tepat sasaran.



Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 5

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
5.	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	%	80,34	46	87,42	190,04	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel 3.14 di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 realisasi persentase pendidikan dasar minimal terakreditasi B di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 87,42 % jauh melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 46 % dengan persentase capaian kinerja 190,04 persen. Tingkat pencapaian indikator ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 yaitu 80,34 persen. Peningkatan persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B ini menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah pendidikan dasar terakreditasi B}}{\text{Jumlah pendidikan dasar seluruhnya}} \times 100\%$$

Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 409 sekolah dasar dan 61 sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta. Jumlah sekolah dasar yang sudah terakreditasi minimal B sebanyak 350 sekolah sedangkan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) yang sudah terakreditasi minimal B sebanyak 60 sekolah.

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilaksanakan oleh BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) dengan tahapan 1)Penetapan Sasaran sekolah/madrasah, 2)Sosialisasi dan penyampaian perangkat akreditasi, 3)Pengisian dan Pengiriman Instrumen Akreditasi, 4)Penetapan Kelayakan Sekolah/Madrasah dan Penugasan Asesor, 5)Visitasi Ke Sekolah/Madrasah, 6)Validasi Proses dan Hasil Visitasi, 7)Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi, 8)Penetapan Hasil

dan Rekomendasi Akreditasi, 9)Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi, 10)Sosialisasi Hasil Akreditasi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional telah diatur tentang pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah. Sekolah yang akan melaksanakan akreditasi harus memenuhi persyaratan – persyaratan dalam Permendikbud meliputi 8 standar pendidikan yaitu :

1. Standar Isi (SI), mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Standar Proses (SP), pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL), untuk pendidikan dasar dan menengah melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK), di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
5. Standar Sarana dan Prasarana (SSP), Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
6. Standar Pengelolaan (SPI), dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa.
7. Standar Pembiayaan (SPb), yang dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan terdiri atas biaya investasi bantuan pendidikan, biaya personal biaya operasional satuan pendidikan.
8. Standar Penilaian Pendidikan (SPP), yang dilakukan di sekolah dasar mengacu pada sistem penilaian berkelanjutan yang dikembangkan oleh tim jaringan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Standar penilaian pendidikan yang dilakukan di SD dilakukan melalui penilaian tertulis, lisan dan praktek.

Dari 8 standar tersebut masih ada beberapa sekolah yang belum memenuhi salah satu dari standar tersebut seperti Standar Sarana dan Prasarana (SSP), yaitu belum cukup ruang kelas yang layak serta Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK), yaitu masih adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi Strata 1.



Gambar 3.12
Pengarahan Untuk Akreditasi Sekolah

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

1. Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan



Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
6.	Angka Harapan Hidup	Persen	68,23	69,98	68,58	98 %	Berhasil

Berdasarkan tabel 3.15 diketahui bahwa realisasi capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 adalah 68,58 persen dan capaian ini belum berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 69,98. Meskipun demikian, capaian kinerja indikator angka harapan hidup pada tahun 2019 ini dikategorikan Sangat Berhasil yaitu sebesar 98 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, nilai Angka Usia Harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan pada tahun 2019. Angka usia harapan hidup merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang

Dalam rangka mewujudkan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya pengendalian masalah kesehatan sebagai berikut :

1) Penemuan penyakit menular

Pada tahun 2019, persentase pencapaian penyakit menular yang ditangani adalah 100 % dengan artian semua penyakit menular seperti demam berdarah (DBD), TB, Kusta, HIV dan Filariasis yang ditemukan dapat ditangani 100%.



Gambar 3.13 Pemeriksaan Pasien TB

2) Membentuk Korong dengan Posbindu PTM

Pada tahun 2019, persentase pencapaian adalah 50% (306 korong). Beberapa jenis PTM adalah penyakit kronik dan/atau katastrofik yang dapat mengganggu ekonomi penderita dan keluarganya. Upaya pengendalian faktor risiko PTM yang telah dilakukan berupa promosi Perilaku Bersih dan Sehat serta pengendalian masalah tembakau. Kabupaten Padang Pariaman telah menerbitkan peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu Perda No 4 tahun 2017.

- 3) Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 4) Membentuk Korong imunisasi atau Korong Universal Child Immunization (UCI)
- 5) Penanganan Balita stunting (pendek)
Persentase balita pendek (stunting) berdasarkan data survailans gizi tahun 2019 yaitu 16,93% dari 31.511 jumlah balita ditemukan 5.336 anak dengan stunting.
Status gizi
- 6) Status gizi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan derajat kesehatan. Penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi status gizi penduduk golongan rawan gizi yaitu anak-anak berumur dibawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui.

Untuk mencapai sasaran Indikator angka usia harapan hidup, diwujudkan melalui program:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengawasan Obat dan makanan
4. Program perbaikan giizi masyarakat
5. Program pengembangan lingkungan sehat
6. Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Program standarisasi pelayanan kesehaan
9. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
12. Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dasn anak
13. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Selain program- program tersebut, Kabupaten Padang Pariaman juga mempunyai inovasi terkait pelayanan kesehatan antara lain :

A. Program Padang Pariaman Sehat (Papa Sehat)

Program ini bertujuan memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan terhadap masalah kesehatan dimasyarakat. Dengan Program Padang Pariaman Sehat ini dapat terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai & profesional, teratasinya kasus-kasus penyakit dan masalah kesehatan yang ditemukan langsung oleh bidan desa dan petugas kesehatan serta meningkatnya

peran aktif masyarakat dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir.

B. Gerakan Nikah Sehat Padang Pariaman (GERNIS PAPA)

Gernis Sehat ini merupakan gerakan yang diperuntukkan untuk setiap pasangan yang akan menikah, dimana pasangan ini wajib melakukan pemeriksaan HIV. Apabila pasangan tersebut tidak melakukan pemeriksaan HIV maka KUA tidak akan menikahkan pasangan tersebut.



Gambar 3.14
Penyuluhan Gernis Papa terhadap pasangan calon Pengantin oleh tenaga kesehatan

C. Padang Pariaman Tanggap Kasus Gawat Darurat (PAPA TANGKAS GADA) PSC 119

Program ini merupakan wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami kegawatdaruratan. Dalam menjalankan fungsinya Pos Yan Gadar Terpadu berperan untuk:

- a. Mempercepat response time penanganan korban kegawatdaruratan Pra Rumah Sakit.
- b. Mempercepat proses evakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat.
- c. Mencegah kecacatan dan kematian akibat kegawatdaruratan.

D. LNPPG (Laskar Nagari Peduli Pangan dan Gizi)

Merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan intensif kepada ibu hamil mulai dari awal pertama kehamilan sampai anak usia 24 bulan (1000 HPK) melalui pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Laskar Nagari Peduli Gizi mengintervensi semua permasalahan gizi yang ada mulai dari masalah gizi masyarakat sampai ke masalah gizi individu dengan kerjasama lintas sektor dan lintas program yang baik terkait dengan memaksimalkan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat.



Gambar 3.15 Petugas dan Laskar Nagari Peduli Pangan dan Gizi sedang melakukan pendampingan kepada masyarakat

- E. **Silenting (Aksi Bersama Lintas Sektor Entaskan Stunting)**
Merupakan serangkaian aksi atau bentuk kegiatan pencegahan dan pengentasan stunting yang dilakukan bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor yang berorientasi intervensi integrasi terhadap sasaran data surveilans gizi yaitu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita. Bentuk aksi ini dengan menjalin kerjasama dan komitmen dengan lintas program dan Lintas Sektor sampai ke tingkat Nagari dan Masyarakat. Program pengentasan stunting ini dilakukan tidak pada sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan, namun juga pada Semua Siklus Kehidupan (intervensi Gizi Anak Sekolah, intervensi gizi remaja, ibu hamil, bayi dan balita). Tahap pertama yang sudah dilakukan adalah bentuk intervensi bertujuan untuk pencegahan kasus stunting melalui percepatan pelayanan adminduk. Nanti akan dilakukan berbagai bentuk intervensi bersama dengan Sektor terkait lainnya.
- F. **JUMSEPASE (Jumat Sehat Padang Alai Semangat)**
Merupakan inovasi berbasis peran serta masyarakat dalam melakukan skrining deteksi dini dan pemantauan faktor resiko, PTM yang dilaksanakan secara rutin dan periodik. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan setiap hari jumat kecuali hari libur di Pos Pemuda Korong Pasar Balai nagari Gunung Padang Alai jam 09.00 s/d 12.00 WIB. Bentuk pelayanan pada Jumsepase adalah skrining hipertensi, obesitas, diabetes mellitus serta penyakit jantung, yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar.



Gambar. 3.16 Pemeriksaan kesehatan masyarakat pada kegiatan inovasi “ Jumpasepase”

G. JEVALA (Jemput IVA ke Lapangan)

Suatu inovasi dimana petugas kesehatan langsung turun ke lapangan untuk meningkatkan pencapaian deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara.



Gambar 3.17 Pelaksanaan JEVALA oleh tenaga kesehatan

H. Duta TB

Sebuah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penjarangan kasus TB Baru melalui kader yang telah dilatih (Duta TB) untuk melakukan kunjungan rumah dan bertugas untuk memberikan penyuluhan TB, menemukan orang terduga TB, memantau pengobatan pasien TB dan melakukan pencatatan dan pelaporan.



Gambar 3.18 Seorang Duta TB sedang melakukan kunjungan dan penyuluhan TB

I. Cetak Mires

Cetak Mires (Cepat Tanggap Ibu Hamil Beresiko) merupakan inovasi yang berbasis peran serta masyarakat dalam melakukan pendampingan pada ibu hamil yang beresiko yang dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan dari kegiatan ini adalah peran serta masyarakat dalam pendampingan ibu hamil yang beresiko.



Gambar 3.19 Pelaksanaan kegiatan “Cepat Mires” kepada ibu hamil beresiko

J. Pos Gizi

Pos Gizi merupakan tempat berkumpulnya balita kurang gizi dan orang tua/pengasuh untuk belajar mempraktikkan perilaku unik positif yang telah terbukti dapat mempertahankan status gizi balita. Tujuan pos gizi adalah untuk pemulihan balita kurang gizi yang diidentifikasi dalam masyarakat, memungkinkan keluarga-keluarga tersebut mempertahankan status gizi secara mandiri dan mencegah kekurangan gizi pada anak-anak yang akan lahir.

K. Pensil

Pensil (Pendampingan Setia Ibu Hamil) adalah suatu program inovasi yang ditujukan kepada ibu hamil melalui pemantauan yang terus menerus mulai dari diketahui hamil sampai pasca melahirkan dengan menunjuk seorang pendamping yang dapat memantau, mencatat serta melaporkan kepada bides atau petugas kesehatan.

L. Geliga

Geliga (Gerakan Peduli Keluarga) adalah suatu inovasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pemantauan ibu hamil untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi oleh kader.

M. Klinik PTM

Klinik Penyakit Tidak Menular (Klinik PTM) adalah suatu inovasi yang bergerak dalam bidang pencegahan penyakit tidak menular. Masyarakat bisa secara mandiri mendeteksi dini penyakit tidak menular.

Di klinik PTM bisa melakukan check kesehatan, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, lingkaran perut, kolestrol dan konseling.

❖ Hambatan dan Masalah

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar serta pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang dimiliki di puskesmas.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.
3. Belum optimalnya promosi kesehatan yang dilakukan dalam merubah perilaku hidup sehat pada masyarakat.
4. Fungsi Puskesmas masih dominan sebagai kuratif (pengobatan), belum optimal dalam upaya promotif dan preventif.
5. Alokasi anggaran bidang kesehatan masih belum sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu 15% dari APBD
6. Upaya peningkatan cakupan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Penerima Bantuan Iuran APBN dan APBD.

❖ Strategi pemecahan masalah:

1. Memberikan pelatihan kepada petugas untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melengkapi kekurangan SDM yang ada melalui rekrutmen BLUD di Puskesmas.
2. Memperkuat kerjasama lintas sektor dalam menuntaskan masalah kesehatan pada masyarakat.
3. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dengan melibatkan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat secara lebih aktif.
4. Mengoptimalkan fungsi puskesmas dalam upaya kesehatan secara promotif dan preventif melalui kegiatan-kegiatan luar dan dalam gedung.
5. Penguatan dari anggaran Pusat (DAK), APBD dan pola integrasi baik yang bersumber dari pemerintah pusat (DAK) maupun daerah seperti ADD (Alokasi Dana Desa).
6. Menambah penganggaran untuk kepesertaan bagi masyarakat miskin/kurang mampu melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Penerima Bantuan Iuran APBN, Penerima Bantuan Iuran APBD.

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Misi 4

Misi 4 : Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan							
Tujuan 1 : Terwujudnya Padang Pariaman Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	183.600 orang	70.000 orang	396.790 orang	566,84%	Sangat Berhasil
Tujuan 2 : Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas							
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	62,28	64 %	63,68	99,5 %	Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	47,12	50,6	55,26	109,21 %	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	62,67	80	64	80 %	Berhasil
Tujuan 3 : Terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan							
5.	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	7	8	7	87,50 %	Berhasil
Tujuan 4 : Meningkatkan Jumlah Investasi							
6.	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah Investor	69 Investor	65 Investor	84 Investor	129,23 %	Sangat Berhasil



Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 7

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
7.	Jumlah kunjungan wisata	orang	183.600	70.000	396.790	566,84	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran : Jumlah Wisatawan Tahun Sekarang

Dari tabel 3.17 di atas terlihat bahwa jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 baik wisatawan nusantara maupun manca negara adalah 396.790 orang. Jumlah ini sangat jauh melebihi target yang telah ditetapkan 183.000 orang dengan persentase capaian kinerja sebesar 566,84 persen. Jumlah kunjungan wisata tahun 2019 ini juga lebih tinggi atau meningkat sebesar 116,18 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan kunjungan 183.600 orang.

Tabel 3.18
Data Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

No	Nama Objek Wisata	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Total Wisatawan
Wisatawan Minat Khusus				
1	Wisata Treking Air Terjun Nyarai	12.711	98	12.809
2	Wisata Bukik Siriah / Mountain View	3.451	0	3.451
Wisata Bahari / Kuliner				
3	Wisata Tirta Bahari Tiram Tapakis	63.816	214	64.030
4	Wisata Bahari Pantai Panjang	63.806	94	63.900
Wisata Alam				
5	Wisata Alam Air Terjun Baburai	9.820	13	9.833
6	Wisata Alam Pemandian Lubuk Bonta / Rumah Putih	25.576	38	25.614
7	Wisata Alam Baburai Sipisang dan Bukik Sapan	6.361	0	6.361
8	Wisata Air Terjun Sarasah	2.201	0	2.201
9	Wisata Alam Anai Resort/Puncak Anai/ Tirta Alami	85.188	194	85.382
10	Wisata Alam Pantai Barselona	1.327	0	1.327
11	Wisata Alam Pantai Arta	21.324	21	21.345
12	Wisata Arung Jeram	2.249	32	2.281
Wisata Religi				
13	Wisata Religi Makam Syekh Burhanudin	91.119	182	98.256
Jumlah Wisatawan		388.949	866	396.790

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi kegiatan :

- Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata ini dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi kegiatan secara internal dan eksternal dengan bentuk kerjasama promosi dengan stake holder yang mendukung promosi.

- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Promosi pariwisata ini dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan berupa pameran seperti pameran Pesona Pariwisata Nusantara di Yogyakarta, Pameran Gebuar Wisata dan Budaya Nusantara di Hall A Jakarta Convention Center, dan Acara Event Pameran Internasional di Indonesia Deep & Extreme Indonesia dengan menampilkan nilai-nilai seni dan karya seni yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang melibatkan tim sanggar yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 3.20

Penerimaan cinderamata pada acara pameran pesona pariwisata di Yogyakarta

- Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan baliho/spanduk pada objek-objek wisata, brosur, shopping bag, dan sebagainya.



Gambar 3.21
Peta Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman

➤ Apresiasi Seni dan Pertunjukan

Kegiatan ini merupakan pertunjukan atau penampilan kesenian di objek-objek wisata dan penampilan kesenian dalam rangka acara resmi, penyambutan tamu pemerintah pusat maupun daerah.



Gambar 3.22 Penampilan kesenian oleh salah satu sanggar di objek wisata Katapiang dan Tiram

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

➤ Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas pariwisata berupa pengembangan sarana dan prasarana di objek wisata dan belanja jasa perencanaan pembuatan FS Rest Area Malibou Anai.

➤ Pengembangan Daya Tarik Wisata

Kegiatan ini merupakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata, antara lain pembangunan jalur pejalan kaki (Boardwalk), pembangunan menara pandang, pembangunan kios cendramata, pembuatan tempat parkir.



Gambar 3.23 Sarana dan prasarana pariwisata Pantai Tiram

3. Program Pengembangan Kemitraan

➤ Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan baik manca negara maupun lokal. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pemandu wisata yang ada di setiap wilayah kepariwisataan di Kabupaten Padang Pariaman. Di Kabupaten Padang Pariama hingga tahun 2019, terdapat 14 (empat belas) Kelompok Sadar Wisata.

Tabel 3.19
Nama Kelompok Sadar Wisata Berdasarkan Lokasi Wisata

No.	Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
1.	Air Terjun Nyarai	Lubuk Alung	Wisata Minat Khusus
2.	Pantai Panjang	Kataping	Wisata Bahari/Kuliner
3.	Baburay	Kampung Dalam	Wisata Alam
4.	Lubuk Bonta	2 X 11 Kayu Tanam	Wisata Alam
5.	Baburai Sipisang dan Bukik Sapan	Tandikek	Wisata Alam
6.	Pantai Tiram	Ulakan	Wisata Bahari/Kuliner
7.	Gua Aie Ilang	Lubuk Alung	Wisata Alam
8.	Pantai Arta Indah	Sei. Limau	Wisata Bahari
9.	Air Terjun Sarasah	Batang Anai	Wisata Alam
10.	Bukik Siriah/Mountain View	Sei. Geringging	Wisata Alam
11.	Air Terjun Pelangi	Lubuk Alung	Wisata Alam
12.	Pantai Barcelona	Batang Gasan	Wisata Bahari
13.	Pantai Gasan Lestari	Batang Gasan	Wisata Bahari
14.	Pantai Arta Permai	Sei.Limau	Wisata Bahari

➤ Pelayanan Kepariwisata

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang terlatih dan tersertifikasi dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan baik manca negara maupun lokal. Pelatihan yang telah dilakukan berupa pelatihan tata kelola destinasi pariwisata, pelatihan paratayang, pelatihan kuliner dan belanja, pelatihan pemandu ekowisata, pelatihan balawisata/Lifeguard. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pada pemandu wisata yang ada di setiap wilayah kepariwisataan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 3.24 Pelatihan pemandu wisata kepada Pokdarwis

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

1. Besarnya dukungan dan partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan terhadap pengembangan objek wisata.
2. Objek wisata yang sudah terkelola dengan baik yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan
3. Adanya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) beserta Paket Wisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata
4. Terlibatnya para pelaku ekonomi kreatif pada Event di tingkat daerah dan nasional sehingga menimbulkan semangat kepada para pelaku untuk meningkatkan kreativitas yang berdampak pada peningkatan omset pelaku tersebut.



Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 8

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
8.	Persentase Jalan Mantap	%	62,28	64 %	63,68	99,50 %	Berhasil

Tabel 3.20 menunjukkan bahwa realisasi Indikator Persentase Jalan Mantap belum mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar 64 persen. Realisasi indikator ini hanya 63,68 persen dengan capaian kinerja 99,5 persen. Meskipun demikian realisasi persentase jalan mantap tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018. Hal ini berarti terjadi peningkatan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya baik jalan nasional, provinsi maupun Kabupaten. Pada tahun 2019, panjang jalan dalam kondisi baik adalah 1.433,91 Km sedangkan panjang jalan seluruhnya 2.251,74 Km.

Persentase jalan mantap diukur dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$$

Untuk mencapai terwujudnya indikator sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1). Pembangunan jalan;
 - 2). Pembangunan Jalan Jembatan;
 - 3). Penilaian Kondisi Jalan;
 - 4). Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan.
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan melalui 3 (tiga) kegiatan:
 - 1). Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan (Pendamping DAK);
 - 2). Pemeliharaan rutin jalan;
 - 3). Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Reguler);
3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan melalui kegiatan :
 - (1)rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat;
 - (2)rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium keniamargaan;
 - (3) Operasional pemberdayaan alat berat;
 - (4)Pengedalian dan pengujian mutu.

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 9

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
9.	Rasio jaringan irigasi	rasio	47,12	50,6	55,26	109,21	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel 3.21 diketahui bahwa indikator rasio jaringan irigasi yang memiliki target sebesar 50,6 persen berhasil terealisasi sebesar 55,26 persen dengan capaian 109,21 persen. Hal ini berarti realisasi indikator ini mampu melebihi target yang telah ditetapkan pada RPJMD ataupun perjanjian kinerja. Selain itu, realisasi Rasio jaringan irigasi tahun 2019 ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018. Rasio Jaringan Irigasi memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian, yang diukur dengan menggunakan formula :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100 \%$$

Untuk mewujudkan agar indikator ini tercapai, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu : 1). Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi; 2). Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi; 3). Infrastruktur irigasi (DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan); 4). Administrasi DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan; 5). Operasional dan pemeliharaan (OP) irigasi; 6). Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (PPSIP).
2. Program Pengendalian Banjir melalui 1 (satu) kegiatan yaitu : 1). Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.



Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 10

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
10.	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	%	62,67	80	64	80 %	Berhasil

Sasaran strategis “meningkatkan kualitas infrastruktur pemukiman” dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak dihitung berdasarkan formula :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi layak}}{\text{Jumlah rumah tangga seluruhnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 3.22 diketahui bahwa indikator Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak yang memiliki target sebesar 80 persen hanya mampu terealisasi sebesar 64 persen dengan capaian kinerja 80 persen. Hal ini berarti realisasi indikator ini belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2019. Namun demikian, capaian indikator Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai 62,67 persen. Rumah tangga dikatakan memiliki sanitasi layak apabila memiliki fasilitas tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan dan dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah (SPAL). Pada tahun 2019, rumah tangga berakses sanitasi layak berjumlah 62.531 dari 97.702 rumah tangga yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk meningkatkan rumah tangga bersanitasi layak, Pemerintah Daerah Padang Pariaman melakukan beberapa program diantaranya :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu : 1). Identifikasi peta jaringan air minum Padang Pariaman ; 2). Pembangunan jaringan perpipaan dan air minum (DAK Penugasan); 3). Pembangunan jaringan perpipaan dan air minum (DDUB); 4). Lanjutan Pamsimas; 5). Percepatan pelaksanaan pembangunan penyehatan pemukiman; 6). Penyusunan DED air bersih.

2. Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1). Penyediaan sarana sanitasi; 2).Operasional kegiatan penyediaan sarana sanitasi (SANIMAS); 3). Penyediaan sarana sanitasi (DAK Penugasan); 4). Penyediaan sarana sanitasi (DAK reguler).
3. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong melalui 2 (dua) kegiatan yaitu : 1). Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 2).DED drainase Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
 1. Program pengembangan perumahan
Pelaksanaan program ini melalui kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan kegiatan penunjang fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah . Pada tahun 2019 telah dibangun sebanyak 419 unit rumah layak huni.
 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pelaksanaan program ini berupa pembangunan drainase permukiman yang dilaksanakan di Korong Kampung Apar Tengah, Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai sepanjang 161 meter.



Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 11

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
11.	Jumlah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	kawasan	7	8	7	87,5	Berhasil

Formulasi Pengukuran : *Jumlah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh*

Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai posisi dan potensi strategis untuk dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru bagi daerah sekitarnya. Berdasarkan tabel 3.23 diketahui bahwa jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berhasil terwujud tahun 2019 adalah 7 kawasan dari 8 kawasan yang ditargetkan. Persentase capaian indikator ini mencapai 87,5 persen dengan kategori Berhasil. Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Padang Pariaman dalam mewujudkan capaian indikator ini direalisasikan dalam

berbagai program dan kegiatan meliputi Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dan Program Perencanaan Tata Ruang.

- ❖ Faktor pendukung keberhasilan capaian Indikator kawasan strategis :
 1. Pembebasan lahan yang tersedia tempat kawasan
 2. Dukungan dari pimpinan dan masyarakat sehingga bisa menunjang perekonomian
 3. Anggaran / pagu yang mendukung terlaksananya kawasan tersebut.
 4. Letak tata ruang yang sudah memadai



Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 12

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
12.	Jumlah Investor	Investor	69	65	84	129,23	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Berdasarkan tabel 3.24 dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dimana capaiannya masuk kategori “Sangat Berhasil” yaitu sebesar 129,23 persen. Pada tahun 2019, jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman adalah 84 investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang pelaku usahanya berasal dari dalam negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang pelaku usahanya berasal dari luar negeri. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 52 investor.

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi
Melalui kegiatan promosi berskala nasional yang bertujuan menggaet investor, mensosialisasikan dan mengeksplor berbagai keunggulan Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan peluang investasi, serta penyediaan informasi baik

melalui website ataupun melalui pelayanan yang diberikan, diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam menarik minat investor dalam berinvestasi. Selain itu, dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan yang mendukung percepatan realisasi investasi di kabupaten padang pariaman.

Pada tahun 2019 target realisasi investasi sebesar 155 Milyar berhasil terealisasi sebanyak 318,23 Milyar. Keberhasilan ini terjadi mengingat iklim investasi yang kondusif di Padang Pariaman sehingga banyak perusahaan yang berinvestasi dan secara signifikan menaikkan nilai investasi. Kemudian kebijakan pemerintah pusat yang pro investasi, seperti pencabutan Izin Gangguan (HO) dan retribusinya didukung meningkatnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan investasi melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online, dan terakhir DPMPTP melalui bidang Penanaman Modal terus berupaya melakukan pembinaan secara intensif kepada perusahaan tentang cara pembuatan dan pelaporan LKPM secara online. Dibandingkan dengan tahun 2018 untuk realisasi indikator ini, pencapaian jumlah investor dan realisasi nilai investasi terbilang sangat berhasil. Keberhasilan tersebut akan diproyeksikan bersama dengan penciptaan gagasan dan ide-ide inovatif dalam menarik Investor, yang kemudian dituangkan dalam sebuah perencanaan pengembangan peluang investasi. Sehingga hal tersebut memberikan sebuah gambaran secara umum kepada khalayak investasi diseluruh penjuru Indonesia maupun dunia tentang potensi besar Kabupaten Padang Pariaman di dunia investasi.



Gambar 3.25

Kepala DPMPTP dalam Kegiatan Promosi Peluang Investasi Melalui Forum Investasi

Bagi investor yang telah berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman, juga dilakukan upaya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (PMA/PMDN) yang ada di Kabupaten

Padang Pariaman. Melalui Klinik LKPM (Konsultasi Layanan Investasi dan Pendampingan Proses Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal), TIM LKPM Online melakukan kunjungan ke pelaku usaha yang wajib Laport Kegiatan Penanaman Modalnya di Padang Pariaman. Hal ini bertujuan agar semua perusahaan yang wajib LKPM tidak lupa dengan kewajibannya sekaligus melalui kewajiban ini kita dapat memantau pergerakan investasi di Padang Pariaman.



Gambar 3.26

Kunjungan Tim LKPM Online ke Perusahaan-Perusahaan

2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Melalui program ini telah dilakukan upaya Penyederhanaan Proses Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif di Padang Pariaman, sehingga proses perizinan lebih akuntabel, efektif dan efisien. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk penyusunan draft Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) yakni *draft* ranperda IMB, Izin Lokasi, IUJK dan Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu.

Dengan mengusung strategi “jemput bola”, untuk mewujudkan pelayanan langsung ke masyarakat melalui beragam inovasi seperti SEJATI (Sehari jadi gratis), AJEP PAPA (Antar jemput perizinan Padang Pariaman), SINARO (Sistem informasi berbasis android), TERASI (Tracking status izin), TAMU KECE (Konsultasi bisnis pemula dan Weekend Service), BESAN POS (Bekerja sama dengan PT.POS Indonesia), PAPA JOSS (Padang Pariaman Jemput OSS), PANTER DARAT (Pengaduan terintegrasi dengan Inspektorat), KLINIK LKPM (Konsultasi Layanan Investasi untuk kemudahan laporan kegiatan Penanaman Modal), SIKIM (Suara Industri Kecil Menengah), SIPINTER (Sistem Informasi Peluang Investasi Terintegrasi), PALANTA (Pelayanan Lansung Tuntas), PURI INDAH (Pusat Informasi Investasi dan Perizinan daerah), PENA TARASIK (Pelayanan Perizinan

Terintegrasi Kecamatan), Kampung Cokelat Malibou (akan terealisasi pada tahun 2020 namun sudah di loncungkan pada tahun 2019 ini), TTD EL (Tanda Tangan Elektronik), PELARI CETAR (Pelayanan Perizinan Cetak Dirumah) serta klinik LKPM. Inovasi pelayanan juga didukung oleh perubahan sarana pelayanan seperti gedung kantor yang representatif, yang pada akhirnya dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menikmati pelayanan dan mendapatkan izin yang dibutuhkan.

Adapun Inovasi berbasis Android melalui Aplikasi diantaranya :

- SiPADU, yang dapat digunakan untuk Layanan Terpadu untuk Publik
- Sistem Pelayanan (SIMPEL) digunakan untuk mempermudah pengurusan izin.



Gambar 3.27

Kepala DPMPPTP bersama Tim Palanta melayani langsung ke tempat pelaku usaha

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

1. Inovasi layanan yang berorientasi pada kemudahan sehingga meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Padang Pariaman
2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pro investasi, salah satunya pencabutan Izin Gangguan (HO) dan Retribusinya.
3. Meningkatnya kesadarannya perusahaan untuk penyampaian laporan realisasi investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Secara Online maupun Manual.
4. Upaya pembinaan yang dilakukan secara intensif kepada perusahaan - perusahaan tentang tata cara pembuatan LKPM secara Online.

❖ Hambatan dan Masalah

1. Belum selesainya Perda RTRW dikarenakan memerlukan waktu untuk melakukan pembahasan dari hal ini akhirnya menyebabkan/ menghambat para investor untuk berinvestasi di Padang Pariaman, karena lokasi yang dipilih untuk berinvestasi terkadang lokasi existingnya berbeda dengan yang terdapat pada perda RTRW
2. Belum semua kecamatan memiliki RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), sesuai dengan yang diakomodir oleh Perda RTRW

3. Masih kurangnya dana untuk melakukan kajian akademis (FS/ PRA FS, Master Plan,) peluang investasi
4. Masalah pelepasan hak tanah yang masih dikendalikan oleh makelar tanah, karena status tanah yang akan dijadikan oleh investor untuk berinvestasi sebagian besar masih tanah ulayat
5. Masih minimnya Kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha
6. Kurangnya fasilitas kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha
7. Masih Lambatnya respon Dinas Teknis dalam percepatan investasi di Kabupaten Padang Pariaman

❖ Strategi pemecahan masalah :

1. Meningkatkan promosi investasi kabupaten padang pariaman baik tingkat nasional maupun internasional
2. Melakukan kajian akademis (FS/ PRA FS, Master Plan,) peluang investasi
3. Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang kemudahan melakukan pengurusan perizinan berusaha
4. Meningkatkan fasilitas kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha
5. Percepatan revisi Tata Ruang melalui RTRW
6. Menyusun RDTR per kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman
7. Meningkatkan koordinasi untuk mempercepat respon Dinas Teknis dalam percepatan investasi di Kabupaten Padang Pariaman
8. Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya semua jenis izin bagi kelangsungan dan aktivitas usaha.

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Misi 5

Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan							
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka kemiskinan	8,04	8,26	7,10	114,04	Sangat Berhasil
2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Angka Pengangguran Terbuka	6,65	7,68	5,97	122,26	Sangat Berhasil

3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	49,46 Juta Rp	53,516 Juta Rp	51,218 Juta Rp	95,71	Berhasil
----	------------------------------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------	----------



Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 13

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
13.	Angka kemiskinan	persen	8,04	8,26	7,10	114,04	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Penduduk dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk seluruhnya}} \times 100\%$

Berdasarkan tabel 3.26 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 adalah 7,10 persen. Realisasi ini berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu 8,23 persen dengan capaian indikator kinerja 114,04 persen dengan kategori “Sangat Berhasil”. Angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2018 yang mencapai 8,04 persen. Hal ini berarti terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin yang mencapai 33,2 ribu jiwa berhasil menurun menjadi 29,48 ribu jiwa.

Untuk mewujudkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial dan P3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa strategi kebijakan antara lain :

1. Meningkatkan penyaluran bantuan sosial dan ekonomi kerakyatan yang tepat sasaran di antaranya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni, Bantuan Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Peningkatan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pembangunan.

2. Meningkatkan peran perempuan kepala keluarga dalam meningkatkan penghasilan keluarga yang nantinya mereka dapat keluar dari kemiskinan.
3. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan, didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat dan memperkuat substansi, dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan serta pengendalian inflasi daerah.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya:

1. Pelaksanaan Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin melalui pemberian bantuan usaha kepada 3 Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jenis bantuan yang diberikan disesuaikan dengan jenis usaha rintisan yang telah mereka kembangkan selama ini.



Gambar 3.28. Penyerahan Bantuan Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 16.648 KPM. Pada kegiatan PKH ini adanya Graduasi Mandiri yang artinya penerima manfaat atau KPM PKH sudah bisa lepas dari program bantuan sosial yang selama ini diberikan pemerintah, karena penerima manfaat dinilai telah mandiri secara ekonomi serta tidak lagi memenuhi syarat kondisional sebagai KPM PKH. Sehingga pada akhirnya mengurangi jumlah data kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2019 jumlah KPM Graduasi Mandiri sebanyak 100 orang KPM.



Gambar 3.29. Penyerahan Piagam Penghargaan kepada KPM PKH Graduasi Mandiri

3. Penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2019 jumlah bantuan sosial berupa paket sembako yang disalurkan sebanyak 277 paket bantuan.



Gambar 3.30. Penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam

4. Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial. Pelaksanaan kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui peran LKKS (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial) untuk membantu masyarakat dalam mengurangi permasalahan sosial pada masyarakat miskin di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2019 LKKS telah memberikan bantuan sembako untuk keluarga miskin/kurang mampu di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 30 KK.



Gambar 3.31. Penyaluran Bantuan LKKS

5. Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA)

Untuk Tahun 2019 telah disalurkan Beras Sejahtera (RASTRA) kepada 19.615 KK miskin yang masuk ke dalam Basis Data Terpadu.



Gambar 3.32. Penyerahan Beras Sejahtera kepada Keluarga Miskin yang terdata dalam Basis Data Terpadu

6. Pemberian Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi perempuan kepala keluarga dalam mengembangkan usaha yang dikelola guna peningkatan penghasilan keluarga.



Gambar 3.33. Pelaksanaan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan

7. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa dengan kegiatan melakukan pembinaan terhadap usaha kecil mikro dan menengah serta pengembangan produk unggulan pedesaan
8. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

9. Program Pelaksanaan Program PKK dengan kegiatan pembinaan dasawisma, tabulapot, TOGA, tanaman pekarangan rumah, darmawanita dan organisasi wanita.
10. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan kegiatan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
11. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dengan kegiatan fasilitas pengembangan UKM.
12. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan .
13. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan kegiatan pelaksanaa tera/tera ulang UTTP, monitoring distribusi barang bersubsidi, pelaksanaan pengawasan kemetrolagian, pengembangan kemetrolagian daerah dan operasional dan pengembangan UPT Metrologi.
14. Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor dengan kegiatan membangun jejaring dengan eksportir, koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait.
15. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pembangunan pasar rakyat.
16. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan kegiatan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima.
17. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis masyarakat.
18. Program peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan peningkatan kesempatan kerja dan bursa kerja online serta pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
19. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan



Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 14

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
14	Angka Pengangguran Terbuka	persen	6,90	7,68	5,97	122,26	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran :
$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 3.27 dapat diketahui bahwa realisasi Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 adalah 5,97 persen. Realisasi tingkat pengangguran ini mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 7,68 persen dengan persentase capaian 122,26 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menurunkan angka pengangguran masuk kategori “Sangat Berhasil”. Angka pengangguran terbuka tahun 2019 ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan tahun 2018.

Pengurangan pengangguran menjadi isu pembangunan daerah karena pengangguran menjadi hambatan dalam pembangunan dan menambah beban tanggungan yang berat bagi rumah tangga dan daerah serta berkaitan dengan kemiskinan. Untuk penanganan pengangguran tersebut, Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pembenahan pada sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi penawaran adalah peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sehingga cocok dengan permintaan di pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, pembenahan balai latihan yang dapat menghasilkan dan mengembangkan wirausaha baru untuk sektor UMKMK dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi permintaan tenaga kerja adalah meningkatkan dan membuka lapangan kerja baru dan alternatif bagi pekerja yang masuk kategori setengah pengangguran. Kebijakan - kebijakan tersebut direalisasikan dalam bentuk program kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
5. Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif

Pada akhir tahun 2019, jumlah pencari Kerja yang terdaftar sebanyak 3.423 orang sedangkan jumlah Pencari Kerja yang di tempatkan akhir tahun 2018 sebanyak 2.557 orang dan jumlah rekomendasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 129 orang. Selama tahun 2019, kegiatan pelatihan sebanyak 47 paket serta pelatihan dan bantuan mesin jahit di Padang Sago dengan peserta 17 orang.



Gambar 3.34
Kegiatan pelatihan Yang diadakan BLK

- ❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:
 1. Ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang memberikan pelatihan kepada masyarakat agar siap diterima di dunia kerja.
 2. Adanya bursa tenaga kerja (job fair) serta Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan mengenai rekrutmen calon tenaga kerja yang siap pakai.
 3. Banyaknya kegiatan pembangunan padat karya terutama kegiatan yang bersumber dari dana desa.
 4. Kemudahan dalam pengurusan Kartu Pencari Kerja
 5. Adanya program magang di beberapa perusahaan.
 6. Menyebarkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan.
 7. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat membuka lapangan kerja baru.

- ❖ Hambatan dan Masalah:
 1. Masih kurangnya keterampilan para pencari kerja
 2. Masih terbatasnya akses permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha.
 3. Masih tingginya minat masyarakat untuk menjadi PNS
- ❖ Strategi pemecahan masalah
 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pelatihan keterampilan.
 2. Menambah jumlah sarana dan prasarana BLK
 3. Meningkatkan jumlah, kapasitas dan kualitas instruktur
 4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta/ perusahaan baik dalam maupun luar negeri terkait dengan penyaluran dan rekrutmen tenaga kerja
 5. Meningkatkan pelaksanaan Job Fair
 6. Menggalakkan semangat kewirausahaan pada generasi muda.
 7. Menggalakkan produksi dalam negeri dan produksi lokal.
 8. Mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen Kartu Pencari Kerja
 9. Menumbuhkan UMKM baru



Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 15

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
15.	Pendapatan perkapita	Juta Rp	49,46	53,516	51,218	95,71	Berhasil

Formulasi Pengukuran : Jumlah pendapatan perkapita dalam rupiah

Pendapatan perkapita merupakan nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk. Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan per kapita di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 51,218 juta rupiah. Realisasi ini belum mampu mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 53,516 juta rupiah. Meskipun demikian, capaian kinerja indikator ini “Berhasil”, dengan persentase capaian 95,71 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan perkapita tahun 2018, Pendapatan perkapita Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar

Rp.1,76 juta atau tumbuh sebesar 3,55 persen. Peningkatan pendapatan perkapita ini ditopang oleh peningkatan masing-masing lapangan usaha pembentuk PDRB terutama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan (7,07 %), Pertambangan dan penggalian (11,78 %), Konstruksi (15,19%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (12,23 %).

Besaran pendapatan perkapita merefleksikan kemakmuran (*wealth*), daya beli (*purchasing power parity*), dan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Semakin besar Pendapatan perkapita suatu wilayah, menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah produksi. Dengan peningkatan pendapatan perkapita berarti adanya peningkatan perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun.

Untuk mencapai sasaran strategis 15 ini, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan program dan kegiatan melalui perangkat daerah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui program:
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan:
 - Peningkatan kemampuan lembaga petani
 - Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani
 - Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao
 - Pengembangan Produk Olahan Kelapa
 - Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), melalui kegiatan:
 - Penanganan daerah rawan pangan
 - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
 - Pengembangan lumbung pangan desa
 - Pengembangan perbenihan/pembibitan
 - Penyuluhan sumber pangan alternatif
 - Pengembangan Usaha Pertanian Melalui Peningkatan Produktifitas Lahan dan Air (HIBAH WISMP2)
 - Pemanfaatan Lahan Terlantar Melalui Optimalisasi Lahan (OPL)
 - Pengembangan Usaha Pertanian Melalui Peningkatan Produktivitas Lahan dan Air (Pendamping Paralel WISMP2)
 - Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air
 - Pengadaan Alsintan

- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
 - Pembinaan Usaha Pertanian Organik
 - Penunjang Pasca Panen dan Pemasaran Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
 - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
 - Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
 - Pengembangan Tanaman Hortikultura
 - Pengembangan Tanaman Perkebunan
 - Peningkatan Produktivitas Produksi Pertanian
 - Operasional Brigade Tanam
 - Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah
 - Peningkatan Produksi Kakao Melalui Intensifikasi
 - Pengembangan Rehabilitasi Kelapa
 - Perlindungan dan Pengendalian HPT Tanaman Pangan
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui program:
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, melalui kegiatan:
 - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
 - Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
 - Pelayanan Kesehatan hewan
 - Uji bahan pangan asal hewan
 - Program peningkatan produksi hasil peternakan, melalui kegiatan:
 - Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
 - Pelayanan Inseminasi Buatan
 - Peningkatan Pemanfaatan Pakan Lokal
 - Pengembangan Sapi pada Kawasan Terpadu
 - Pengembangan Kawasan HMT dan Sapi
 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, melalui kegiatan:
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
 - Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM melalui program:
- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, melalui kegiatan:
 - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, melalui kegiatan :
 - Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM
 - Program peningkatan dan pengembangan ekspor, melalui kegiatan:
 - Membangun jejaring dengan eksportir
 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui kegiatan:
 - Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
 - Pengembangan pasar lelang daerah
 - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
 - Pembangunan Pasar Nagari (DAK)
 - Promosi Hasil Produk Daerah
 - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar
 - Pembangunan Pasar Nagari (APBD)
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, melalui program:
- Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
 - Penjajakan Investasi dan Promosi
 - Penyusunan Buku Potensi dan Data Investasi
 - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, melalui kegiatan:
 - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
 - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu, melalui kegiatan:
 - Operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Pengadaan Buku Pedoman dan Papan informasi Pelayanan Perizinan
 - Operasional Peningkatan Pendapatan Daerah
 - Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah, melalui kegiatan:
 - Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
 - Peningkatan dan pengembangan mutu produk industri kecil daerah serta pengawasan pembinaan IKM
 - Lanjutan Pengembangan Industri Cokelat
 - Program peningkatan kemampuan teknologi industri, melalui kegiatan:
 - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

- Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur.
 - Program Penataan Struktur Industri, melalui kegiatan:
 - Pengembangan Potensi Kawasan Industri
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Program pembangunan jalan dan jembatan, melalui kegiatan:
 - Pembangunan jalan
 - Pembangunan jembatan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, melalui kegiatan:
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
 - Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan)
 - Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (WISMP)
 - Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (WISMP 2 Hibah)
 - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan:
 - Pembangunan/peningkatan infrastruktur
 - Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan:
 - Penyusunan Revisi RTRW
 - Penyusunan RDTR dan KLHS
6. Dinas Perhubungan
- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, melalui kegiatan:
 - Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
 - Pendataan dan Pemberian Izin Berlayar pada Kapal dibawah 7 GT
 - Program peningkatan pelayanan angkutan, melalui kegiatan:
 - Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
 - Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan jalan
 - Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
 - Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, melalui kegiatan:
 - Koordinasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
 - Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, melalui kegiatan:
 - Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Nagari /Pokja Kredit Mikro
 - Fasilitasi BUMNag dan Kelembagaan Pasar Nagari

- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, melalui kegiatan:
 - Evaluasi Perkembangan Nagari
 - Operasional Program TMMD
 - BBGRM
 - Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, melalui kegiatan:
 - Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, melalui kegiatan:
 - Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
 - Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata
 - Atraksi Pariwisata
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian
 - Pelaksanaan Event Pacu Kuda
 - Program pengembangan destinasi pariwisata, melalui kegiatan:
 - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
 - Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
 - Pelaksanaan Event Pasie Maelo
 - Penyusunan Master Plan Pariwisata
 - Penataan Kawasan Pariwisata (DAK Fisik)
 - Amenitas Pariwisata (DAK Fisik)
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui kegiatan:
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, melalui kegiatan:
 - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
 - Pendataan PBB
 - Operasional Pemungutan PAD
 - Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10. Dinas Perikanan
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, melalui kegiatan:
 - Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir
 - Pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR)
 - Program pengembangan budidaya perikanan, melalui kegiatan:
 - Pembinaan dan pendampingan Pada POKDAKAN/UPR
 - Gerakan Induk Ikan Unggul (Gaul)

- Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari)
- Pengembangan Kawasan Minapolitan
- Pengembangan Wirausaha perikanan
- Optimalisasi Pemanfaatan Kolam Terlantar
- Restocking Benih Ikan Perairan Umum
- Program pengembangan perikanan tangkap, melalui kegiatan:
 - Pembinaan Kelompok Nelayan Kecil
 - Fasilitasi Kelembagaan Kelompok Perikanan Tangkap
 - Pelatihan Teknologi Mesin Kapal Penangkapan Ikan
- Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dengan kegiatan:
 - Pengawasan dan pengujian mutu hasil perikanan
 - Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
- Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, melalui kegiatan:
 - Pengembangan kawasan sentra perbenihan ikan gurami
 - Pengembangan Kawasan Budidaya air payau
 - Pengembangan Kawasan budidaya air tawar



Tabel 3.29 Capaian Kinerja Misi 6

Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik							
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WDP	75 %	Berhasil
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	BB	B	80 %	Berhasil
		Nilai LPPD	3,12	3,3	2,99	90,61 %	Berhasil
Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas							

2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima, Aspiratif Dan Partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	76,20	78,61	79,66	101,34	Sangat Berhasil
----	--	---	-------	-------	-------	--------	-----------------

1. Opini Laporan Keuangan

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 16

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
16.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WDP	75	Berhasil

Semenjak tahun 2008, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah diterima Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 6 (lima) kali yaitu: tahun 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Opini Laporan Keuangan juga ditargetkan akan dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Namun, dari tabel 3.27 dapat dilihat indikator kinerja Opini Laporan Keuangan dengan target WTP tahun 2019 tidak dapat dipertahankan karena hanya memperoleh predikat WDP. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran Opini Laporan Keuangan:

Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat nomor 61/S-HP/XVIII.PDG/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2018, terdapat beberapa temuan yang material dari 4 (empat) kriteria pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 meliputi :

1. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara.

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil penilaian kerja setiap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menjelaskan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

Tabel 3.31
Skor Hasil Opini BPK

No	Jenis Opini BPK	Skor
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
2	Wajar dengan Pengecualian (WDP)	3
3	Tidak Wajar	2
4	Tidak Menyatakan Pendapat	1

Adapun kriteria yang dijadikan perhatian BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
2. Kecukupan Pengungkapan.
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping keempat kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material.

Opini LKPD ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan yang baik terhadap opini LKPD ini dari tahun ke tahun menjadi indikator penting dari kondusifnya pemerintahan daerah yang sedang berlangsung. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa saja berbeda antar entitas pemerintah daerah yang satu dengan entitas pemerintah daerah lainnya, tergantung kualitas SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, luasan wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang ada di daerah.

Untuk meraih kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman maka strategi yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Temuan BPK RI

Dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun sebelumnya diharapkan semua pihak terkait bersama-sama berperan aktif dalam menyelesaikan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya. Terkait tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK RI atas Laporan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan pemetaan terhadap Temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan. Status tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat berupa telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dalam proses (belum selesai tindak lanjutnya), dan belum ditindaklanjuti.

2. Peningkatan Peran APIP

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan peran pengawasan internal pemerintah secara optimal dan berkualitas. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintah, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik. Aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) harus mengoptimalkan perannya dalam menjaga keandalan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. APIP harus melakukan review sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, hingga pendampingan pada saat pemeriksaan oleh BPK. Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan level SPIP, meningkatkan Kapabilitas APIP, serta meningkatkan Anggaran APIP sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah

Untuk mencapai suatu tata kelola keuangan daerah yang handal dan profesional harus dilakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkesinambungan berupa pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis terhadap aparatur pengelola keuangan, sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam memanfaatkan Teknologi Informasi maka hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Padang Pariaman adalah membangun simda online yang terkoneksi dengan semua organisasi perangkat daerah di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selain kedepan

aplikasi simda ini akan terintegrasi antara pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang daerah serta melaksanakan SP2D Online dengan Bank Nagari.

5. Koordinasi yang baik antara unit terkait baik internal maupun eksternal

Upaya yang tidak kalah penting dalam rangka meraih kembali opini WTP atas laporan keuangan daerah kabupaten Padang Pariaman adalah meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. "Ini sangat perlu dilaksanakan untuk keselarasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga menjadi komitmen dari semua pihak dalam rangka memperoleh kembali opini WTP.

6. Deteksi dini potensi permasalahan yang dapat menjadi temuan pemeriksaan

Menghindari potensi temuan LKKL tahun berikutnya. APIP agar berperan aktif dalam mencegah potensi temuan LKKL pada tahun berikutnya, seperti peningkatan efektifitas sistem pengendalian intern dan pencegahan pelanggaran kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

7. Pencegahan berulangnya temuan pemeriksaan melalui upaya :

- Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara auditor Inspektorat dengan objek pemeriksaan (auditi) dan pihak-pihak lain yang terkait;
- Peningkatan integritas dan profesionalisat aparatur pengelola keuangan daerah;
- Penguatan sistem pengendalian intern pada objek pemeriksaan (audit);
- Penyatuan visi dan komitmen pimpinan SKPD dalam mewujudkan tujuan organisasi;
- Penyempurnaan atau perubahan regulasi.
- Meningkatkan Peran Inspektorat dalam pembinaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 16

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
17.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	B	BB	B	80	Berhasil

Implementasi sistem AKIP terhadap Pemerintah Daerah dilihat dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :
 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/481/AA.05/2019 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh predikat “B” dengan nilai 67,01. Hal ini berarti capaian indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan “BB” dan sama dengan capaian nilai SAKIP Tahun 2018. yaitu “B”. Meskipun tidak memenuhi target, jika dilihat dari perolehan poin, nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dari 65,80 pada tahun 2018 menjadi 67,01 pada tahun 2019 sebagaimana dilihat pada tabel 3.33 berikut :

Tabel 3.33
Aspek Evaluasi SAKIP

NO	ASPEK YANG DIEVALUASI	NILAI MAKSIMAL	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	19,81	21,53	21,61
2	Pengukuran Kinerja	25	15,32	16,46	17,36
3	Pelaporan Kinerja	15	9,15	10,90	11,49
4	Evaluasi Internal	10	4,96	5,89	5,80
5	Capaian Kinerja	20	10,89	11,01	10,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,13	65,80	67,01
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

Program dan kegiatan untuk mencapai indikator sasaran tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- a) Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.
- b) Evaluasi LAKIP SKPD

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan nilai SAKIP tahun 2019 antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah dan Kepala perangkat daerah dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pelaksanaan workshop bagi seluruh Kepala OPD dan teknis terkait agar memahami SAKIP secara keseluruhan.
3. Penyempurnaan *cascading* kinerja OPD guna memastikan tercapainya berbagai tujuan yang telah dituangkan dalam RPJMD
4. Melakukan keselarasan antara kegiatan, program dan sasaran strategis untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran efisien dan efektif untuk mencapai sasaran pembangunan



Gambar 3.35
Sosialisasi Penginputan data pada Simda Perencanaan

5. Rapat koordinasi internal dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat dan seluruh OPD dalam rangka penyamaan persepsi untuk dalam menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja daerah.
6. Dibentuknya Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019.
7. Pelaksanaan review dan evaluasi SAKIP oleh Tim Review Inspektorat yang bertugas untuk mereview implementasi SAKIP OPD serta melakukan pendampingan terhadap Kasubag perencanaan OPD dalam menyusun LAKIP OPD-nya. Selain itu Tim juga melakukan review terhadap LAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018. Tujuan dilaksanakan review atas LAKIP adalah memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan, data/informasi kinerja Pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Belum target nilai SAKIP “BB” Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 disebabkan karena masih terdapatnya kelemahan-kelemahan implementasi SAKIP antara lain :

1. Tingkat pemahaman SAKIP di setiap perangkat daerah masih belum merata, masih terdapat pimpinan perangkat daerah yang belum memahami kinerja dan indikator kinerja yang akan dicapai;
2. Kinerja sebagian perangkat daerah belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup;
3. Perjenjangan (*cascading*) kinerja dilakukan lebih kepada upaya membagi tugas sesuai dengan struktur yang sudah ada dan memperahankan program/kegiatan yang selama ini biasa dilakukan;
4. Belum melakukan perjenjangan kinerja hingga level pelaksana sehingga masih ditemui SKP pegawai yang belum sesuai dengan IKU dan masih hanya mengacu pada tugas dan fungsi;
5. Belum membangun sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan data kinerja.

Untuk meningkatkan nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020, maka perlu upaya untuk menindak lanjuti hasil evaluasi/rekomendasi penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman SAKIP terutama pada lini pimpinan perangkat daerah agar tercipta kesamaan persepsi mengenai akuntabilitas kinerja dan menekankan pentingnya keterlibatan dalam pencapaian kinerja lebih komprehensif.
2. Memastikan kinerja dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan PK) telah berorientasi hasil (*outcome*) serta selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan melengkapinya dengan target-target kinerja terukur baik jangka menengah maupun tahunan.
3. Menyempurnakan proses perjenjangan (*cascading*) kinerja agar lebih menggambarkan proses bisnis terwujudnya kinerja utama yang akan dicapai.
4. Memastikan tersedianya ukuran kinerja pada setiap jenjang jabatan sampai individu secara spesifik, relevan dan terukur serta memastikan PK dan SKP yang disusun menggambarkan kinerja berorientasi hasil.

5. Membangun sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi sehingga dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja dan sebagai sarana pengumpulan data pelaporan kinerja organisasi yang berkualitas.
6. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP kepada perangkat daerah melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan.

3. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 16

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
18.	Nilai LPPD	Angka	3,12	3,3	2,99	91	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan Formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran Nilai LPPD :
 Hasil terhadap laporan LPPD

Berdasarkan tabel 3.34 diketahui bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai LPPD dengan skor 2,99 dengan status kinerja tinggi tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 tahu 2018. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berada pada ranking ke 113 dari 396 Kabupaten se-Indonesia. Capaian ini belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu skor 3,3 namun tetap termasuk kategori sangat berhasil dengan persentase capaian 91 persen. Pencapaian tahun 2019 juga lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2018 skor nilai LPPD yang diraih 3,12 dengan sangat status tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi, tidak tercapainya target nilai LPPD tahun 2019 di pengaruhi oleh faktor antara lain :

1. Pada Tataran Pengambil Kebijakan terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yang capaian kinerja memperoleh prestasi Rendah
2. Pada Tataran Pelaksana Kebijakan :
 - a. Administrasi Umum

Terdapat 140 indikator Kinerja Kunci dengan prestasi rendah yang pelaksanaan kegiatannya/pencapaian pada perangkat daerah
 - b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
 - Terdapat 2 urusan wajib (Sosial dan Trantibum) dengan prestasi Rendah
 - Terdapat 1 urusan pilihan (pertanian) dengan prestasi Sedang

Untuk mewujudkan indikator ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan upaya antara lain melaksanakan workshop atau bimbingan teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Program dan kegiatan yang mendukung yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan LPPD.



Gambar 3.36

Workshop Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019

Hambatan dan masalah :

1. Kurangnya perhatian pemangku kepentingan dalam merespon penilaian LPPD
2. Hasil evaluasi terhadap LPPD tidak ditindaklanjuti dengan sistematis
3. Indikator kinerja IKK dalam LPPD banyak yang belum sinkron dengan dokumen perencanaan.

Strategi Pemecahan Masalah :

1. Meningkatkan perhatian dan komitmen stake holder dalam penilaian LPPD
2. Menindaklanjuti Hasil evaluasi LPPD dengan sistematis
3. Sinkronisasi Indikator kinerja IKK dalam LPPD dengan dokumen perencanaan



Tabel 3.35 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 17

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
19.	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	Nilai	76,20	78,61	79,66	101,34	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$

Berdasarkan tabel 3.35 diketahui bahwa indikator rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD tahun 2019 adalah 79,66 (baik). Realisasi nilai indikator ini mampu melebihi target sebesar 76,61 dengan capaian kinerja 101,34 persen (sangat berhasil). Capaian ini juga meningkat sebesar 3,46 poin, dibandingkan dengan Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD tahun 2018 yaitu 76,20 (kurang baik). Peningkatan nilai IKM ini menunjukkan terus terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sebagai sebuah komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada 6 (enam) unit layanan di Kabupaten Padang Pariaman, yang meliputi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Perusahaan Daerah Air Minum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 6 unit pelayanan, berdasarkan persepsi rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD pada masing-masing unit pelayanan yang disurvei dapat dilihat pada tabel 3.33.

Tabel 3.36
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan OPD Tahun 2019

No	Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	KinerjaUnit Pelayanan
1	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	86,27	B	Baik
2	RSUD Kabupaten Padang Pariaman	82,41	B	Baik
3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian	80,27	B	Baik
4	BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman	78,90	B	Baik
5	PDAM Kabupaten Padang Pariaman	74,81	C	Kurang Baik
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75,29	C	Kurang Baik
Rata-rata		79,66		Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 6 OPD yang dilakukan survey IKM, 4 OPD memperoleh nilai B dan 2 OPD memperoleh nilai C. Namun jika dibandingkan dengan capaian nilai tahun 2018 terjadi peningkatan pada tahun 2019 seperti data tabel 3.37.

Tabel 3.37
Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2018-2019

NO	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	2018		2019	
		Mutu Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Nilai IKM
1	DISDUKCAPIL	B	83,01	B	86,27
2	DPMPPTP	B	77,24	B	80,27
3	BKPSDM	B	76,69	B	78,90
4	RSUD	B	76,97	B	82,41
5	PDAM	C	70,22	C	74,81
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	C	73,07	C	75,29

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang meliputi 9 unsur yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanis dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan dan kinerja pelayanan maka berpedoman kepada tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Tabel 3.38
Nilai Mutu Pelayanan berdasarkan Permenpan RB

Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017				
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik



Gambar 3.37
Suasana Pelayanan Masyarakat di Dinas
Kependudukan Pencatatan Sipil



Gambar 3.38
Suasana Pelayanan Masyarakat di Dinas
Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan



Gambar 3.39
Pelayanan Masyarakat Yang Dilaksanakan di RSUD
Padang Pariaman

Berdasarkan hasil survey IKM 2019, dari 6 perangkat daerah yang disurvei masih terdapat 2 (dua) perangkat daerah dengan nilai kriteria kurang baik yaitu PDAM dan Dinas Pendidikan Kebudayaan. Hal ini disebabkan adanya kekurangan dan kelemahan terhadap pemenuhan kriteria yang perlu diperbaiki pada tahun selanjutnya. Untuk mengatasi permasalahan di atas maka diperlukan :

1. Peningkatan pemahaman Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dalam menerapkan Permen PAN Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.
4. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja serta melakukan inovasi, baik inovasi percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja.



Tabel 3.39 Capaian Kinerja Misi 7

Misi 7 : Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Kesiapan Sarana Dan Prasarana Yang Ramah Bencana							
Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Bencana							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Masyarakat Tangguh Bencana	Nagari Tangguh Bencana	2 Nagari	2 nagari	2 nagari	100%	Berhasil

Nagari Tangguh Bencana adalah nagari yang sudah mempunyai perencanaan terhadap pengurangan resiko bencana, penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana. Adapun tahapan nagari tangguh bencana telah mempunyai :

- Rencana Pengurangan Resiko Bencana (RPB)
- Mempunyai Peta Rawan Bencana
- Sudah memiliki Kelompok Siaga Bencana (KSB)
- Sudah memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Formulasi Pengukuran : Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Berdasarkan tabel 3.39 diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Nagari Tangguh Bencana tahun 2019 mampu terealisasi sesuai dengan target 2 nagari dengan capaian 100 persen (Sangat Berhasil). Realisasi ini juga sama dengan capaian tahun 2018. Di Tahun 2018, 2 Nagari tangguh bencana meliputi Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai dan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau sedangkan tahun 2019 terdapat 2 nagari tangguh bencana yaitu Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Anduring Kecamatan 2 x11 Kayu Tanam.

Upaya pembenukan nagari tangguh bencaa diwujudkan melalui Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dengan Kegiatan Pembentukan Nagari Tangguh Bencana. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan nagari tangguh bencana diantaranya :

1. Penyusunan Regulasi Rencana Pengurangan Resiko Bencana (RPB) dan Kawasan Resiko Bencana (Peta Rawan bencana) untuk seluruh nagari

2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama camat dan nagari untuk mengaktifkan kembali KSB yang tidak aktif dan membentuk bagi nagari yang belum mempunyai kelompok siaga bencana (KSB)
3. Melakukan sosialisasi dan simulasi terhadap sekolah yang berada di sepanjang pesisir pantai padang pariaman diperkirakan sebanyak 20 sekolah
4. Adanya program BPBD Propinsi Sumatera Barat untuk Nagari tangguh bencana sebanyak 3 Nagari.
5. Melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang penanggulangan kebencana bersama camat dan wali nagari di 17 Kecamatan
6. Melaksanakan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang dilaksanakan setiap tanggal 26 April setiap tahunnya, adapun kegiatannya berupa pelaksanaan simulasi mandiri oleh seluruh OPD dan Kecamatan serta Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar masing-masing OPD yang telah melaksanakan simulasi diharapkan dapat memberikan dan menyebarkan ke pada masyarakat untuk kesiapsiagaan pengurangan resiko bencana.



Gambar 3.40
Sosialisasi dan koordinasi tentang penanggulangan kebencanan
bersama camat dan wali nagari

❖ Hambatan dalam pencapaian kinerja

1. Pemahaman masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana sangat kurang
2. Peran serta aktif masyarakat terhadap nagari tangguh bencana sangat rendah sehingga sulit untuk kegiatan sosialisasi dan kesiapsiagaan

**PENGHARGAAN YANG DIRAIH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019**



PENGHARGAAN “BUPATI PEDULI OLAHRAGA”



PENGHARGAAN PENYUSUNAN MASTER PLAN SMART CITY



PENGHARGAAN SWASTI SABA WIWERDA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



PENGHARGAAN SAKIP



PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAM



ADYTIA KARYA MAHATVA YODHA AWARD



PENGHARGAAN KATEGORI PELAYANAN PRIMA



PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK



PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD



PENGHARGAAN PROKLIM DARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP



PENGHARGAAN DAERAH PERCONTOHAN
NASIONAL PENGUATAN SISTEM PENCATATAN
SIPI, KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN
TAHUN 2019



PENGHARGAAN PENYELENGGARA
KABUPATEN SEHAT TAHUN 2019



PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

Tabel 3.40 Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019			
Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian
Pendapatan Daerah	Rp. 1.520.643.679.559,00	Rp. 1.510.387.058.053,04	99,33%
Belanja Daerah	Rp. 1.322.215.955.846,85	Rp. 1.262.524.123.942,73	95,49%

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1.520.643.679.559,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.510.387.058.053,04 (99,33%) sedangkan dilihat dari aspek belanja, jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 1.262.524.123.942,73 dengan persentase mencapai realisasi 95,49 persen.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.41 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 100.249.901.104,00	Rp. 101.631.618.708,01	101,38%
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.249.910.980.455,00	Rp. 1.219.294.317.990,03	97,55%
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 170.482.798.000,00	Rp. 189.461.121.355,00	111,13%

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada tahun 2019 yang ditargetkan sebesar Rp. 100.249.901.104,00 mampu terealisasi sebesar Rp. 101.631.618.708,01 (101,38%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.42.

Tabel 3.42 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 46.900.000.000	Rp. 48.340.676.868	103,07%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 3.645.000.000	Rp. 2.603.742.637	71,43%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 6.500.000.000	Rp. 6.368.010.478	97,97%
4	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp. 43.204.901.104,00	Rp. 44.319.188.725,01	102,58%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Rp. 100.249.901.104,00	Rp. 101.631.618.708,01	101,38%

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Penyesuaian, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1.249.910.980.455,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.219.294.317.990,03 (97,55%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.43 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2019

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.174.021.924.000	Rp. 1.139.473.819.241.03	97,06%
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	Rp. 22.884.576.000	Rp. 22.884.576.000	100%
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	Rp. 55.004.480.455	Rp. 56.935.922.749	107,42%
Jumlah Pendapatan Transfer		Rp. 1.249.910.980.455	Rp. 1.219.294.317.990.03	97,55%

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Lainnya, Dana Bantuan Pemerintah/Dana Alokasi Desa pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 170.482.798.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 189.461.121.355,00 (111,13%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.44
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	Rp. 75.319.400.000	Rp. 94.412.758.355	125,35%
2	Pendapatan Lainnya	Rp. 125.000.000	Rp. 9.965.000	7,97%
3	Dana Bantuan Pemerintah/Dana Alokasi Desa	Rp. 95.038.398.000	Rp. 95.038.398.000	100%
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp. 170.482.798.000	Rp. 189.461.121.355	111,13%

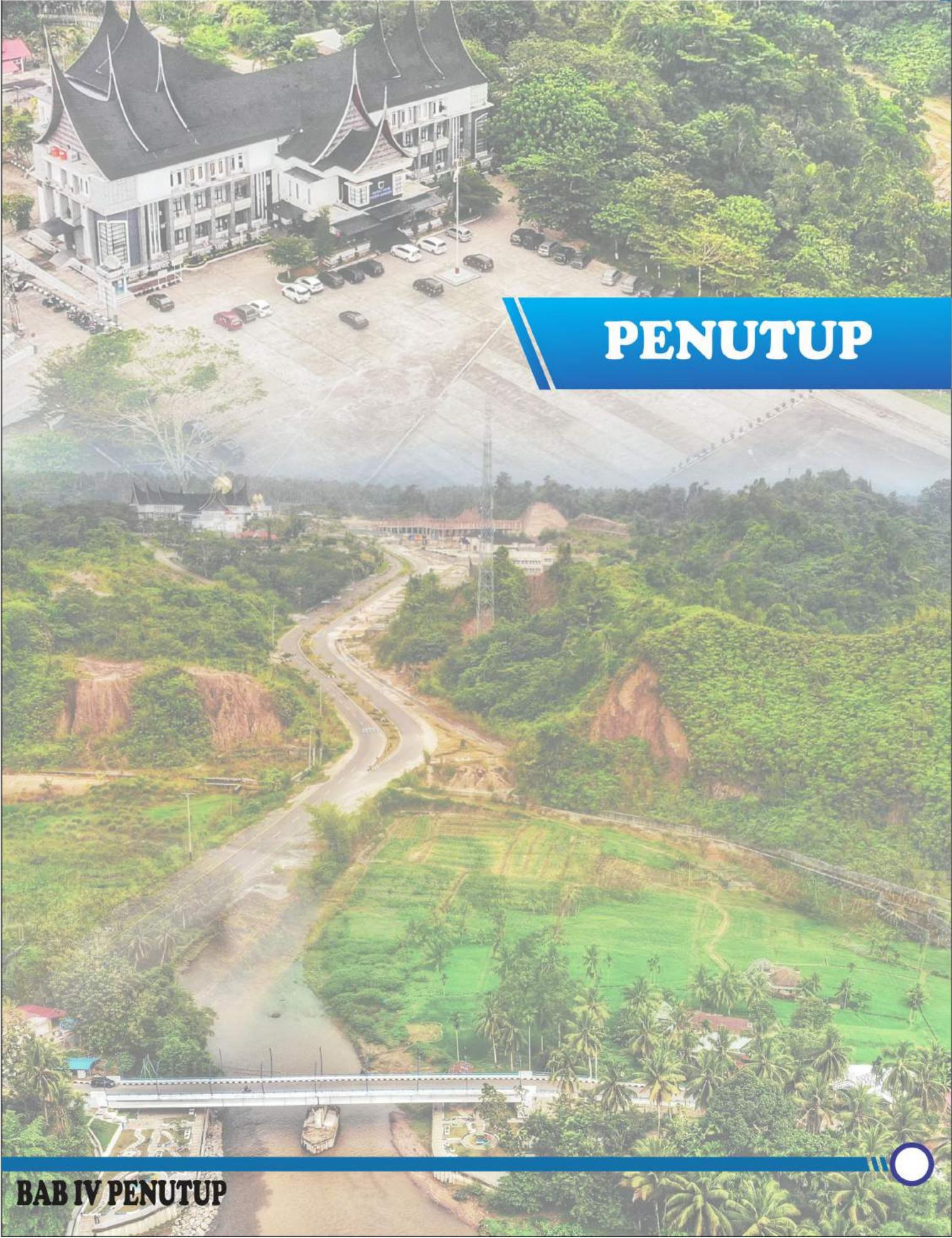
Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 18 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.45
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah									
Tujuan : Peningkatan Pengamalan Agama									
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kinerja		Pagu	Anggaran		
				Realisasi	%		Realisasi	%	
1	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	80%	84.65%	105.81	Rp 252,900,000	Rp 144,449,200	57.12	
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa									
Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Sektor Primer dan Jasa									
2	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. 2.588.467,93	Rp. 4.082.657,32	157.72	Rp 6,312,080,337	Rp 6,200,549,198	98.23	
3	Meningkatkann Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	97.20	95.99	98.76	Rp 1,437,489,100	Rp 1,388,448,812	96.59	
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas Dan Terampil Melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dan Kualitas Tenaga Pendidik									
Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan									
4	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,62 tahun	13,62 tahun	100	Rp 2,412,995,300	Rp 1,507,007,701	62.45	
5	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	46%	87.42%	190.04	Rp 211,190,000	Rp 203,620,800	96.42	
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan									
6	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,98 tahun	68,58 tahun	98	Rp 37,050,000	Rp 25,548,100	68.96	
Misi 4 : Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan									
Tujuan 1 : Terwujudnya Padang Pariaman Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama									
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	70.000 orang	396.790 orang	566.84	Rp 897,628,000	Rp 876,477,048	97.64	

Tujuan 2 : Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas									
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	64%	63.68%	99.50	Rp 29,746,046,472	Rp 27,598,622,938	92.78	
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	50,6	55.26	109.21	Rp 13,308,313,690	Rp 12,440,997,906	93.48	
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80%	64%	80	Rp 517,075,000	Rp 493,205,442	95.38	
Tujuan 3 : Terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan									
11	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan startegis dan cepat tumbuh	8	7	87.5	Rp 38,725,000	Rp 35,689,100	92.16	
Tujuan 4 : Meningkatkan Jumlah Investasi									
12	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor	65	84	129.23	Rp 503,407,500	Rp 498,723,825	99.07	
Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan									
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin									
13	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	8.26%	7.10%	114.04	Rp 5,235,711,407	Rp 4,991,345,998	95.33	
14	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	7.68	5.97	122.26	Rp 324,068,950	Rp 321,561,250	99.23	
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	53,516 Juta Rp	49,500 Juta Rp	92.50	Rp 1,000,513,600	Rp 977,505,047	97.70	
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik									
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel									
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WDP	75	Rp 2,053,239,400	Rp 2,035,707,894	99.146	

		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	BB	B	80	Rp 2,675,744,708	Rp 2,485,879,568	92.90
		Nilai LPPD	3.3	2.99	91	Rp 142,526,211	Rp 136,741,858	95.94
Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas								
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	78.61	79.66	101.34	Rp 48,500,000	Rp 42,577,844	87.79
Misi 7 : Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Kesiapan Sarana Dan Prasarana Yang Ramah Bencana								
Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Bencana								
18	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	2 nagari	2 nagari	100	Rp 3,291,732,998	Rp 3,254,871,470	98.88



PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memperlihatkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja terhadap 20 indikator kinerja yang telah ditetapkan/ dijanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2019. Dari 20 Indikator Kinerja Utama tersebut, 9 Indikator dikategorikan **sangat berhasil**, dan 11 indikator dikategorikan **berhasil**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

B. RENCANA PERBAIKAN KEDEPAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2019 tidak terlepas dari adanya hambatan – hambatan dan kendala. Keberhasilan yang diperoleh merupakan perwujudan dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal dan sebaliknya ketidakberhasilan terhadap target capaian berarti masih kurang mampu mengatasi hambatan dan kendala. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2019 menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan

jangka menengah agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja, telah teridentifikasi hambatan dan masalah yang ditemukan dalam pencapaian pada masing-masing sasaran kinerja serta rumusan strategi pemecahan masalah pada masa yang akan datang dalam menjalankan visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang dijelaskan pada matrik berikut:

**Matrik 4.1:
Masalah dan Strateginya**

Hambatan dan Masalah	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran aktif lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama • Efek negatif kemajuan informasi dan teknologi yang memberikan akses tanpa batas pada masyarakat • Masih maraknya penyakit masyarakat • Masih rentannya karakter masyarakat terutama generasi muda dipengaruhi oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya seperti LGBT, narkoba, pergaulan bebas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama. • Peningkatan fungsi dan peran lembaga adat • Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah terkait penyakit masyarakat. • Pengembangan dan pelestarian budaya daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. • Masih tingginya serangan hama yang beresiko terhadap tingkat produksi hasil pertanian • Masih ada masyarakat tani yang belum memahami dan memanfaatkan teknologi budidaya tani. • Masih kurangnya kualitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan • Daya saing produk pertanian yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mencegah alih fungsi lahan dari pertanian menjadi • Penanganan hama secara menyeluruh yang dilakukan berupa penyuluhan dan pengendalian secara mekanis di lapangan, memberikan obat-obatan pemberantasan hama tikus kepada kelompok tani serta memfasilitasi sarana pemberantasan hama tikus kepada masyarakat tani melalui kelompok tani, salah satunya alat Solder Bakar (Flame Blower). • Peningkatan penggunaan bibit

<p>masih rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih ditemukannya penyakit hewan ternak masyarakat 	<p>unggul bersertifikasi yang tahan hama</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian. Pemberian bantuan/pinjaman alat pertanian melalui kegiatan Operasional Brigade Tanam. Peningkatan penerapan teknologi pertanian Peningkatan kualitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan Peningkatan vaksinasi hewan ternak gratis
<ul style="list-style-type: none"> Faktor Kemiskinan yang mempengaruhi angka putus sekolah Kawasan permukiman yang berjauhan dari sarana pendidikan terutama pada wilayah dengan yang berbukit dan terjal. Budaya, sebagian masyarakat Kabupaten Padang Pariaman masih melestarikan budaya “marantau”, ikut saudara berdagang ke daerah lain. Ketimpangan distribusi guru Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar serta pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang dimiliki di puskesmas. Belum optimalnya promosi kesehatan yang dilakukan dalam merubah perilaku hidup sehat pada masyarakat. Upaya peningkatan cakupan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu melalui Jamkesmas dan Jamkesda di puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah masih terkendala dengan sumber pendanaan dan kebijakan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin berupa pemberian bantuan beasiswa Perbaikan infrastruktur untuk peningkatan akses menuju sekolah Pengoptimalan program wajib belajar sembilan tahun Penataan penempatan guru Peningkatkan sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan anggaran operasional sekolah. Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan Peningkatan promosi kesehatan yang dilakukan dalam merubah perilaku hidup sehat pada masyarakat. Peningkatan cakupan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu melalui Jamkesmas dan Jamkesda di puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah

<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Padang Pariaman yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor ikut mempengaruhi terhambatnya pembangunan sektor ekonomi daerah dan minat investor dari luar untuk melakukan investasi • Permasalahan dan status tanah adat yang ikut mempengaruhi terhambatnya percepatan pembangunan infrastruktur daerah khususnya di bidang pembangunan infrastruktur sektor ekonomi • Penyakit masyarakat yang berkembang seperti peredaran narkoba akan mempengaruhi kualitas SDM generasi muda 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan dan perluasan kesempatan kegiatan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan angkatan kerja baru • Peningkatan sektor-sektor lapangan usaha dan produksi masyarakat • Penumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi produktif lokal melalui upaya pengembangan produk unggulan daerah, kecamatan dan nagari secara terpadu dan berkelanjutan • Pengembangan sarana prasarana infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi masyarakat • Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah melalui jaminan fasilitasi penyediaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur daerah • Pengembangan SDM masyarakat dalam upaya pengembangan usaha produktif masyarakat • Upaya pengembangan kerjasama dengan pihak investor dari luar • Upaya peningkatan PAD Kabupaten Padang Pariaman secara signifikan • Sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD terkait dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara terpadu.
<ul style="list-style-type: none"> • Seringnya bencana alam mengakibatkan kerusakan pada infrastuktur jalan, jembatan dan irigasi • Adanya kegiatan tahun 2018 hampir 80% pekerjaan aspirasi (Pokir DPRD) dan sebahagian besar pekerjaan tersebut yang ditangani adalah jalan status non Kabupaten, sehingga kenaikan persentase jalan Kabupaten pertumbuhan mantapnya kecil. Beberapa ruang jalan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sumber dana pembangunan di luar APBD • Melakukan penganggaran sesuai dengan kondisi real dilapangan. • Peningkatan mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik, dengan mempergunakan bahan yang baik walaupun dibenturkan oleh hal biaya yang ada, karena nilai dari suatu proyek ialah kesesuaian dengan metode teknis yang telah direncanakan.

<p>telah habis umur rencana yang dominan rusak ringan dan rusak berat telah diusulkan oleh Dinas PUPR tidak terlaksana karena defisit anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saluran drainase yang kurang baik dan belum optimal di sepanjang jalan. • Belum optimalnya fungsi pengawasan akibat kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan fungsi tersebut sehingga pemeliharaan jalan pun belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pemeliharaan jalan melalui saluran drainase yang baik di pinggir jalan karena sistem pembuangan air yang kurang baik akan semakin cepat merusak jalan tersebut. • Optimalisasi dalam perencanaan teknis pembangunan jalan, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang mempergunakan jalan tersebut. • Peningkatan pengawasan melalui penambahan kuantitas pegawai di Dinas Pekerjaan Umum sehingga fungsi pengawasan dapat dioptimalkan dan meminimalisir ketidaksesuaian pekerjaan pembangunan jalan dengan prosedur yang telah ditetapkan.
<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya tingkat pengangguran • Pendaftar pencari kerja kurang sehingga sedikit yang mengurus dokumen AK 1 (kartu kuning) ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. • Masih kurangnya kompetensi dan keterampilan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah jenis-jenis pelatihan. • Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan beserta kualitas instruktur. • Peningkatan kerja sama dengan perusahaan • Penumbuhkembangan UMKM baik UMKM baru maupun yang telah ada. • Menggalakkan produksi dalam negeri dan produksi lokal. • Mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen AK 1 • Peningkatan Job Fair secara berkala • Peningkatan program padat karya
<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Evaluasi SAKIP belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan pertimbangan atau feedback dalam perencanaan anggaran dan pembangunan tahun berikutnya. • Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan SAKIP sehingga dalam memproses/menginput data masih mengalami hambatan-hambatan tidak tersedianya data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan penyusunan dokumen-dokumen terkait SAKIP oleh Narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi. • Mengikuti Coaching Clinic tentang SAKIP dengan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi.

<p>yang dibutuhkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan intensif oleh Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman selama proses penyusunan dokumen-dokumen terkait SAKIP sebelum melaksanakan Reviu.
<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada ASN yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. • Masih ada Kelemahan dalam penyediaan nilai persediaan dan nilai aset tetap diantaranya nilai tanah. • Sarana dan prasarana yang kurang lengkap. • Karena keterbatasan jumlah sampel dalam melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, besar kemungkinan ada bias dari hasil survey tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SDM ASN dalam pengelolaan keuangan daerah • Adanya klinik konsultasi di BPKD dan Inspektorat sebagai tempat konsultasi terhadap permasalahan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan OPD, Kecamatan dan Nagari sesuai dengan peraturan yang ada. • Tim Review Inspektorat mendampingi OPD dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghindari adanya kemungkinan kesalahan dan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai serta dapat membantu melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur pada sebagian unit pelayanan. • Belum adanya standar pelayanan pada sebagian unit kerja • Sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang belum mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun standar operasional prosedur bagi unit pelayanan yang belum memilikinya. • Menyusun standar pelayanan bagi unit pelayanan yang belum memilikinya. • Melengkapi sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik • Melakukan survei kepuasan masyarakat secara kontinue untuk mengetahui peningkatan kinerja pelayanan yang telah diberikan. • Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat dan mudah. • Membuat unit pengaduan dan

	<p>pengelola pengaduan yang kompeten</p> <ul style="list-style-type: none">• Menetapkan tarif layanan sesuai dengan aturan yang berlaku.• Menetapkan waktu penyelesaian pelayanan.• Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
--	---

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



**HENDRA SWARA, S.STP,MM
NIP 19810926 19912 1 001**



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Instruksi

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Kinerja.

4. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2021 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan; dan
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Maret 2018



Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Maret 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	SKPD Pengelola
1.	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13 s/d 15 tahun yang bisa baca Al-Quran (IKU)	Jumlah masyarakat usia 13 s/d 15 tahun yang bisa baca Al-Quran /Jumlah masyarakat usia 13 s/d 15 tahun seluruhnya x 100%	Disdikbud Setda (Kesra), Kecamatan	Disdikbud Setda (Kesra), Kecamatan
2.	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian (IKU)	$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian Tahun sekarang} - \text{PDRB Sektor Pertanian Tahun lalu}}{\text{PDRB Sektor Pertanian Tahun lalu}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.	Meningkatnya kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani(IKU)	$\frac{\text{Indek yang diterima petani (It)}}{\text{Indek yang dibayar petani (Ib)}} \times 100\%$	Dintan KP, Disnak Keswan dan Dinas Perikanan	Dintan KP, Disnak Keswan dan Dinas Perikanan
4.	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (IKU)	Jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan/tingkat tertinggi yang pernah diduduki	Disdikbud	Disdikbud
5.	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B (IKU)	$\frac{\text{Jumlah pendidikan dasar terakreditasi B}}{\text{Jumlah pendidikan dasar seluruhnya}} \times 100\%$	Disdikbud	Disdikbud
6.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	Angka usia harapan hidup (IKU)	Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang	Dinas Kesehatan, RSUD	Dinas Kesehatan, RSUD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	SKPD Pengelola
7.	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	<i>Jumlah Wisatawan Tahun Sekarang</i>	Disparpora, DPUPR, Disdagnakerkop UKM, DPMPTP, Dishub, Dinkes, Dis Kominfo	Disparpora, DPUPR, Disdagnakerkop UKM, DPMPTP, Dishub, Dinkes, Dis Kominfo
8.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan Mantap (IKU)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Dinas PUPR
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Ratio jaringan irigasi (IKU)	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	Dinas PUPR	Dinas PUPR
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak (IKU)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi layak}}{\text{Jumlah rumah tangga seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas PUPR, Dinas LHPKPP	Dinas PUPR, Dinas LHPKPP
11.	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan startegis dan cepat tumbuh (IKU)	<i>Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh</i>	Dinas PUPR, Bapelitbangda	Dinas PUPR, Bapelitbangda
12.	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor (IKU)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	DPMPTP	DPMPTP
13.	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan (IKU)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas Sosial PPA, DPMD, Dinkes, Disdagnakerkop UKM, Dinkes	Dinas Sosial PPA, DPMD, Dinkes, Disdagnakerkop UKM, Dinkes
14.	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka (IKU)	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Disdagnakerkop UKM, DPMPTP, DPMD	Disdagnakerkop UKM, DPMPTP, DPMD
15.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita (IKU)	Jumlah Pendapatan Perkapita dalam rupiah	Disdagnakerkop UKM, DPKD, Distna KP, Dinsnak Keswan	Disdagnakerkop UKM, DPKD, Distna KP, Dinsnak Keswan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	SKPD Pengelola
16.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.	Opini Laporan Keuangan (IKU)	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPKD, Seluruh Perangkat Daerah, Inspektorat	BPKD, Seluruh Perangkat Daerah, Inspektorat
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (IKU)	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Setda, Inspektorat, Bapelitbangda, Seluruh Perangkat Daerah	Setda, Inspektorat, Bapelitbangda, Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai LPPD (IKU)	Hasil terhadap laporan LPPD	Setda, Seluruh Perangkat Daerah	Setda, Seluruh Perangkat Daerah
17.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD (IKU)	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Semua OPD	Semua OPD
18.	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana (IKU)	Jumlah Nagari tangguh bencana	BPBD, Satpol PP Damkar	BPBD, Satpol PP Damkar





BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kode Pos 25584
Telepon. (0751) 4784555, Faksimile. 4784554 E-Mail. sekda@padangpariamankab.go.id
Website. www.padangpariamankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALI MUKHNI
Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit Malintang, 4 Januari 2019
BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	80%
2	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. 2.588.467,93
3	Meningkatkann Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	97,20
4	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,62 tahun
5	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	46%
6	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,98 tahun
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	70.000 orang
8	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	64%
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	50,6
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80%
11	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan startegis dan cepat tumbuh	8
12	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor	65
13	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	8,26%
14	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	7,68
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	53,516 Juta Rp
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	BB
		Nilai LPPD	3.3
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	78.61
18	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	2 nagari

No	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 1.080.900.000
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp 1.072.942.500
3	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Rp 7.973.964.000
4	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp 287.980.000
5	Program Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	Rp 238.325.000
6	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp 423.800.000
7	Program Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Pertanian/Perkebunan	Rp 1.180.376.100
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp 427.000.000
9	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 3.016.650.000
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 213.600.000
11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 37.050.000
12	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp 574.950.000

13	Program pengembangan Kemitraan	Rp	598.936.000
14	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp	77.974.400.000
15	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp	18.649.532.000
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp	789.282.000
17	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP)	Rp	1.293.670.000
18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp	50.225.000
19	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	150.870.000
20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	25.061.500
21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp	182.411.000
22	Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Rp	74.435.000
23	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	1.052.835.000
24	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	267.439.500

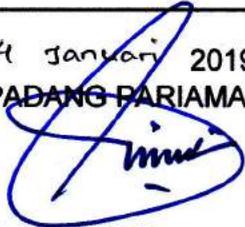
25	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp	32.745.000
26	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Rp	218.825.000
27	Program pembinaan anak terlantar	Rp	10.000.000
28	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp	37.200.000
29	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	702.987.500
30	Program Pengembangan Perumahan	Rp	780.000.000
31	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	305.875.000
32	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	164.388.500
33	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp	90.670.000
34	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp	27.665.000
35	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp	2.337.347.000
36	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp	84.420.000

37	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp	288.310.000
38	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	114.900.000
39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	95.000.000
40	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	143.550.000
41	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp	391.500.000
42	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp	3.783.234.850
43	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp	501.223.750
44	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp	125.000.000
45	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp	1.381.000.000
46	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp	236.800.000
47	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp	166.100.000
48	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp	173.400.000

49	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp	173.760.000
50	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	428.770.000
51	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Rp	185.450.000
52	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rp	50.764.700
53	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp	783.999.308
54	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rp	245.000.000
55	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp	334.632.500
56	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp	478.280.500
57	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp	216.295.000
58	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Rp	40.585.000
59	Program Penelitian	Rp	557.762.500
60	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	161.274.000

61	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Rp	358.235.000
62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp	2.093.300.000
63	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Rp	571.100.000
64	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	Rp	750.000.000
	JUMLAH	Rp	137.257.984.708

Parit Malintang, 4 Januari 2019
 BUPATI PADANG PARIAMAN


 ALI MUKHNI

Lampiran 3
Matrix Pengukuran Kinerja Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu	Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%			Realisasi	%	
1	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	80%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat usia 13 s/d 15 tahun yang bisa baca Al-Quran}}{\text{Jumlah masyarakat usia 13 s/d 15 tahun seluruhnya}} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	84.65%	105.81	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp. 252,900,000	Rp. 144,449,200	57.12	
2	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. 2.588.467,93	$\frac{\text{PDRB Perkapita Tahun sekarang} - \text{PDRB Perkapita Tahun lalu}}{\text{PDRB Perkapita Tahun lalu}} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	Rp. 4.082.657,32	157.72	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Rp. 703,620,967	Rp. 681,485,910	96.85	
								Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Rp. 4,818,124,000	Rp. 4,736,197,925	98.30	
								Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp. 174,147,870	Rp. 173,116,065	99.41	
								Program Pengendalian Hama/ Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	Rp. 228,337,500	Rp. 223,734,300	97.98	
								Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp. 387,850,000	Rp. 386,014,998	99.53	
3	Meningkatkan Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	97.2	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	95.99	98.76	Program Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Pertanian/Perkebunan	Rp. 1,069,011,600	Rp. 1,022,137,699	95.62	
								Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 368,477,500	Rp. 366,311,113	99.41	
4	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,62 tahun	Jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan/tingkat tertinggi yang pernah diduduki	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	13,62 tahun	100	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 2,412,995,300	Rp. 1,507,007,701	62.45	
5	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	46%	$\frac{\text{Jumlah pendidikan dasar terakreditasi B}}{\text{Jumlah pendidikan dasar seluruhnya}} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	87.42%	190.04	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 211,190,000	Rp. 203,620,800	96.42	
6	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,98 tahun	Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	68,58 tahun	98	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 37,050,000	Rp. 25,548,100	68.96	
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	70.000 orang	Jumlah wisatawan tahun sekarang	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	396.790 orang	566.84	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp. 316,367,000	Rp. 299,723,127	94.74	
								Program pengembangan Kemitraan	Rp. 581,261,000	Rp. 576,753,921	99.22	
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	64%	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	63.68%	99.50	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 29,746,046,472	Rp. 27,598,622,938	92.78	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu		Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%		Realisasi	%	Realisasi	%	
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	50,6	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	55.26	109.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp 13,308,313,690	Rp 12,440,997,906	93.48		
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi layak}}{\text{Jumlah rumah tangga seluruhnya}} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	64%	80	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 394,575,000	Rp 373,450,450	94.65		
								Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP)	Rp 122,500,000	Rp 119,754,992	97.76		
11	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan startegis dan cepat tumbuh	8	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	7	87.5	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 38,725,000	Rp 35,689,100	92.16		
12	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor	65	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	84	129.23	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 129,500,000	Rp 128,900,771	99.54		
								Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 29,561,500	Rp 29,522,619	99.87		
								Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp 199,411,000	Rp 196,692,035	98.64		
								Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Rp 144,935,000	Rp 143,608,400	99.08		
13	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	8.26%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	$\frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	7.10%	114.04	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 998,183,907	Rp 989,234,707	99.10		
								Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 287,439,500	Rp 261,621,265	91.02		
								Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, markoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp 35,395,000	Rp 34,145,100	96.47		
								Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Rp 214,000,000	Rp 212,874,550	99.47		
								Program pembinaan anak terlantar	Rp 10,000,000	Rp 4,700,200	47.00		
								Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp 27,200,000	Rp 26,731,500	98.28		
								Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 428,737,500	Rp 385,437,168	89.90		
								Program Pengembangan Perumahan	Rp 86,650,000	Rp 84,042,600	96.99		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu	Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%			Realisasi	%	
								Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 280,075,000	Rp 279,061,800	99.64	
								Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 164,388,500	Rp 164,179,399	99.87	
								Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp 66,720,000	Rp 65,695,100	98.46	
								Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp 27,665,000	Rp 27,664,500	100.00	
								Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp 2,259,577,000	Rp 2,172,249,209	96.14	
								Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp 84,420,000	Rp 67,177,750	79.58	
								Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp 265,260,000	Rp 216,531,150	81.63	
14	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	7.68	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	$\frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	5.97	122.26	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 114,518,950	Rp 114,518,950	100.00	
								Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 95,000,000	Rp 92,825,000	97.71	
								Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 114,550,000	Rp 114,217,300	99.71	
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	53,516 Juta Rp	Jumlah pendapatan perkapita dalam rupiah	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	49,500 Juta Rp	92.50	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 391,500,000	Rp 387,713,100	99.03	
								Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp 389,134,850	Rp 383,843,550	98.64	
								Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp 219,878,750	Rp 205,948,397	93.66	
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	WDP	75	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp 90,000,000	Rp 87,053,934	96.73	
								Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp 1,265,920,000	Rp 1,265,712,700	99.98	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu	Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%			Realisasi	%	
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	78.61	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai perimbang}$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	79.66	101.34	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Rp 48,500,000	Rp 42,577,844	87.79	
18	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	2 nagari	Jumlah nagari tangguh bencana	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	2 nagari	100	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp 2,059,390,962	Rp 2,052,886,931	99.68	
								Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Rp 546,633,036	Rp 527,342,715	96.47	
								Program Peningkatan Mitigasi Bencana	Rp 685,709,000	Rp 674,641,824	98.39	